



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Clarity in Transition

Hadapi Transisi, Kinerja Teruji

Laporan Kinerja

KPKNL JAKARTA V

2025

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah diwajibkan untuk menerapkan sistem pengukuran, pencatatan, dan pelaporan kinerja secara terstruktur.

Menindaklanjuti peraturan tersebut, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V telah menyusun Laporan Kinerja Tahun 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis serta Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja KPKNL Jakarta V Tahun 2025 dimaksud menyajikan hasil pencapaian terhadap 8 (delapan) Sasaran Strategis Kemenkeu *Three* KPKNL dengan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama, yang berhasil mencapai Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2025 sebesar 115,59% beserta hasil analisa atas capaian tersebut.

Dalam Laporan dimaksud, juga disajikan beberapa capaian/penghargaan yang berhasil diperoleh oleh KPKNL Jakarta V selama Tahun 2025 yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Jakarta V, baik dari Kementerian Keuangan, lembaga sertifikasi eksternal, maupun dari Kementerian/Lembaga lain.

Demikian Laporan Kinerja Tahun 2025 ini disusun dengan harapan agar dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan, sekaligus merupakan pertanggungjawaban atas upaya pencapaian tujuan/sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanahkan kepada KPKNL Jakarta V.

Jakarta, 30 Januari 2026

Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik

Partolo



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Ringkasan Eksekutif	iii

BAB I P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang	7
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	8
C. Peran Strategis KPKNL Jakarta V	12
D. Sistematika Laporan	15

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis	16
B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025	18
C. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026	21

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi	23
B. Realisasi Anggaran	67
C. Kinerja Lain-Lain	69

BAB IV PENUTUP

	71
--	----

RINGKASAN EKSEKUTIF

A. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Pertanggungjawaban KPKNL Jakarta V dalam pencapaian tujuan/sasaran strategis yang telah ditetapkan disampaikan kepada pemangku kepentingan melalui LKj Tahun 2025 yang memuat pencapaian sasaran/tujuan strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai bahan monitoring dan evaluasi serta basis perencanaan kinerja tahun berikutnya dalam rangka pencapaian Visi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yaitu *Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.*

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 5 (lima) misi yaitu :

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara.
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum.
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara.
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan Negara, Penilaian, Piutang Negara dan Lelang, KPKNL Jakarta V menyelenggarakan fungsi :

- a. inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara;
- b. registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
- c. pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
- e. pelaksanaan pelayanan penilaian;
- f. Pelaksanaan pelayanan lelang;
- g. penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;

- h. pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
- i. verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
- j. pelaksanaan administrasi KPKNL.

Dalam perencanaan kegiatan, Kementerian Keuangan telah menetapkan kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC) untuk melengkapi Sistem Akuntabilitas Kinerja sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014.

Laporan Kinerja KPKNL Jakarta V Tahun 2025 terdiri dari 8 (delapan) Sasaran Strategis dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Dengan slogan “**LIMA: Lugas, Ikhlas, Mumpuni dan Akuntabel**”, seluruh pegawai KPKNL Jakarta V bertekad untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dengan penuh Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan dan Kesempurnaan sesuai Nilai - Nilai Kementerian Keuangan.

B. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS

Berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan BSC, rata-rata tingkat pencapaian kinerja terhadap 20 (dua puluh) IKU yang merupakan penjabaran dari 8 (sebelas) sasaran strategis Kemenkeu *Three* KPKNL Jakarta V tahun 2025 adalah sebesar 115,59% dengan rincian sebagai berikut:

NO	IKU	TARGET	REALISASI	INDEKS Max. 120
Stakeholder Perspective (30%)				
1.	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya			
1a-CP	Tingkat kepuasan <i>stakeholder</i> dan pengguna layanan	100,00%	120,00%	120,00
1b-CP	Indeks Integritas	100,00	105,29	105,29
1c-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100,00%	132,66%	120,00

Customer Perspective (20%)**2. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal**

2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100,00%	112,71%	112,71
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100,00%	103,53%	103,53
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100,00%	105,63%	105,63

3. Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa

3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74,00	112,72	120,00
-------	---	-------	--------	--------

Internal Process Perspective (25%)**4. Penerapan tata kelola aset yang efektif**

4a-CP	Persentase BMN berupa tanah yang Disertipikatkan	100,00%	121,27%	120,00
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	100,00%	111,54%	111,54

5. Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif

5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	100%	138,19%	120,00
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	111,83%	120,00
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	80,00%	117,76%	120,00

Learning and Growth Perspective (25%)**6. Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, Serta SDM yang Adaptif**

6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100,00	120,00	120,00
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100,00	112,50	112,50
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80,00%	98,00%	120,00
7. Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif				
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100,00	114,73	114,73
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80,00	110,00	120,00
8. Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif				
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	80,00	97,61	120,00
8b-N	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	95,30%	100,00%	104,93
8c-N	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100,00	120,00	120,00
NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO)				115,59

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

KPKNL Jakarta V, sebagai unit vertikal di bawah DJKN Kementerian Keuangan, memegang peranan krusial dalam pengelolaan kekayaan negara, pelayanan lelang, serta pengurusan piutang negara di wilayah Jakarta. Di tengah dinamika ekonomi dan tuntutan modernisasi birokrasi, KPKNL Jakarta V dituntut untuk menyelenggarakan pelayanan yang tidak hanya cepat dan tepat, tetapi juga akuntabel dan transparan sesuai dengan standar mutu nasional.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022, setiap pegawai dan unit kerja wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya. Di lingkungan Kementerian Keuangan, hal ini dipertegas melalui sistem pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC) yang mewajibkan seluruh unit untuk melaporkan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berkala.

Laporan ini disusun untuk memotret realisasi atas target-target strategis yang telah ditetapkan pada tahun 2025, khususnya terkait optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor lelang, sertifikasi Barang Milik Negara (BMN), serta efektivitas pengelolaan aset negara sebagai *revenue center*. Laporan ini berfungsi sebagai bukti nyata kontribusi KPKNL Jakarta V terhadap kesehatan fiskal negara.

Penyusunan laporan kinerja merupakan sarana mengevaluasi implementasi *Core Values* ASN BerAKHLAK dan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan dalam memberikan pelayanan kepada *stakeholder*. Hasil evaluasi ini akan menjadi basis utama bagi pimpinan KPKNL Jakarta V untuk melakukan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) demi meningkatkan indeks kepuasan pengguna jasa di masa mendatang.

Melalui laporan kinerja diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat melihat gambaran utuh mengenai prestasi, kendala, serta solusi strategis yang telah diambil oleh KPKNL Jakarta V dalam mengawal kekayaan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Pasal 30 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 (**PMK 154/2021**) tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara., KPKNL mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, KPKNL menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu :

- a. inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara;
- b. registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
- c. pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
- e. pelaksanaan pelayanan penilaian;
- f. Pelaksanaan pelayanan lelang;
- g. penyaJian informasi di bidang kekayaan . negara, penilaian, dan lelang;
- h. pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
- i. verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
- j. pelaksanaan administrasi KPKNL.

KPKNL dipimpin oleh Kepala kantor yang merupakan pejabat eselon 3, dan terdiri dari 5 (lima) seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional dengan rincian sebagai berikut :

- a. Subbagian Umum;
- b. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara;
- c. Seksi Piutang Negara;
- d. Seksi Hukum dan Informasi;
- e. Seksi Kepatuhan Internal; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pada Tahun 2025 untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KPKNL Jakarta V dilaksanakan oleh 44 (empat puluh empat) orang pegawai dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 1
SDM Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

Golongan	Golongan		Total
	Laki-Laki	Perempuan	
I	-	-	-
II	2	3	5
III	18	16	34
IV	4	1	5
Jumlah	24	20	44

Tabel 2
SDM Berdasarkan Kelompok Pendidikan dan Golongan

Tingkat Pendidikan	Golongan				Jumlah
	I	II	III	IV	
SLTA	-	-	1	-	1
D1	-	-	-	-	-
D3	-	5	3	-	8
D4/S1	-	-	23	-	23
S2	-	-	7	5	12
Jumlah	0	5	34	5	44

Tabel 3
SDM Berdasarkan Pangkat dan Golongan

Golongan	Golongan					Jumlah
	A	B	C	D	E	
II	-	-	-	5	-	5
III	7	14	3	10	-	34
IV	4	1	-	-	-	5
Jumlah	11	15	3	15	0	44

Tabel 4
SDM Berdasarkan Jabatan Fungsional

No.	Jabatan Fungsional	Jumlah Orang
1.	Pelelang Ahli Madya	1
2.	Pelelang Ahli Muda	3
3.	Pelelang Ahli Pertama	3
4.	Penilai Pemerintah Ahli Muda	2
5.	Penilai Pemerintah Ahli Pertama	3
6.	Pranata Keuangan APBN Terampil	1
TOTAL		13

Berdasarkan PMK 154/2021 terjadi perubahan terminologi fungsi utama pada DJKN dari pengelolaan barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara dan lelang menjadi pengelolaan kekayaan negara, penilaian dan lelang. Struktur Organisasi pada KPKNL terkait Penerapan PMK 154/2021 sebagaimana terlihat pada bagan berikut:



Tabel 5
Kelompok Jabatan Fungsional

No.	Nama	Jabatan Fungsional
1.	Erwin Cahyono	Pelelang Ahli Madya
2.	A.Hidran Hakim	Pelelang Ahli Muda
3.	Muhammad Zein Hazimy	Pelelang Ahli Muda
4.	Budi Satrio	Pelelang Ahli Muda
5.	Arief Ar Rosyid	Pelelang Ahli Pertama
6.	Ilman Kurniawan Syaray	Pelelang Ahli Pertama
7.	Ranisa Astria	Pelelang Ahli Pertama
8.	Susanto Eko Prasetya	Penilai Pemerintah Ahli Muda
9.	Husnaeni	Penilai Pemerintah Ahli Muda
10.	Thomas Dedy Mahotama	Penilai Pemerintah Ahli Pertama
11.	Ahmad Chasan Mudzakir	Penilai Pemerintah Ahli Pertama
12.	Yurista Vipriyanti	Penilai Pemerintah Ahli Pertama
13.	Tri Wahyuningsih	Pranata Keuangan APBN Mahir

C. PERAN STRATEGIS KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA V

Sebagai organisasi yang memiliki tugas memberikan pelayanan di bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, Penilaian, Piutang Negara, dan Lelang, KPKNL Jakarta V memiliki peran strategis sebagai berikut :

a. Pengelolaan Kekayaan Negara

Sebagai pengelola kekayaan negara, KPKNL Jakarta V turut berperan dalam mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan negara yang difokuskan pada upaya pemanfaatan kekayaan negara, pengamanan kekayaan negara dan penatausahaan kekayaan negara. Selain itu, KPKNL Jakarta V selaku *aset manager* mengemban tugas menata manajemen aset negara dan menjadikan aset sebagai salah satu indikator peningkatan efektivitas APBN, yaitu melalui optimalisasi aset dalam rangka peningkatan pendapatan negara dan penghematan belanja modal dan belanja pemeliharaan.

b. Penilaian

Penilaian terhadap kekayaan negara merupakan langkah awal dari proses pengelolaan kekayaan negara. Proses penilaian dilakukan setelah adanya analisis oleh pengelola barang yang bertujuan untuk menuju optimalisasi pengelolaan kekayaan negara. Kegiatan penilaian tersebut dimaksudkan untuk memperoleh estimasi atau perkiraan nilai wajar dan nilai sewa wajar dari setiap kekayaan negara berupa tanah, bangunan, kendaraan dan barang milik negara lainnya yang berada pada lingkup Kementerian/Lembaga Negara.

Di sisi lain, penilaian dalam rangka memperoleh nilai pasar dan nilai likuidasi dilakukan terhadap objek penilaian yang merupakan barang jaminan/harta kekayaan lain milik debitur, dalam proses pengurusan piutang negara oleh KPKNL Jakarta V selaku PUPN.

Hasil penilaian barang milik negara tersebut akan digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik negara, dan pengurusan piutang negara. Dengan demikian hasil penilaian dapat membantu mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *The Highest and Best Use*.

c. Pengurusan Piutang Negara

Pengurusan Piutang Negara bertujuan untuk mengamankan keuangan negara dengan melakukan penagihan dan pengurusan piutang macet yang berasal dari instansi pemerintah dan badan-badan usaha yang dikuasai oleh negara baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan perjanjian, peraturan perundangan, dan sebab apapun. Sejak berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006, piutang macet yang berasal dari BUMN perbankan, pengurusannya tidak lagi diserahkan kepada PUPN, sehingga fokus pengurusan dilakukan terhadap piutang negara yang telah diserahkan dan piutang negara yang berasal dari instansi pemerintah.

Selain itu, juga terdapat penyerahan piutang negara dari sejumlah Obligor Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS), aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan eks Bank Dalam Likuidasi (BDL) yang permasalahannya sangat kompleks, yang pengelolaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara.

Dalam rangka penanganan dan pemulihan hak negara berupa hak tagih negara atas sisa piutang negara dari pengelolaan eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan eks Bank Dalam Likuidasi (aset kredit) termasuk Bantuan Likuiditas Bank Indonesia maupun aset properti, dilakukan berbagai upaya hukum dan/atau upaya lainnya di dalam atau di luar negeri, baik terhadap debitur, obligor, pemilik perusahaan serta ahli warisnya maupun pihak-pihak lain, dengan berdasarkan pada ketentuan dalam:

- a) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara
- c) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan PN
- d) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional oleh Menteri Keuangan jo. PMK Nomor 230/PMK.06/2022
- e) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Aset Eks Bank Dalam Likuidasi oleh Menteri Keuangan

d. Pelayanan Lelang

Pelayanan lelang bertujuan untuk menjadikan lelang sebagai sarana transaksi penjualan aset secara umum, sebagaimana fungsi pasar pada umumnya. Selain itu, lelang merupakan pelaksanaan eksekusi terhadap suatu peraturan/putusan/penetapan pengadilan maupun PUPN. Lelang mempunyai manfaat nilai lebih dibandingkan dengan transaksi jual beli biasa, yaitu lebih transparan, akuntabel, efisien, dan dapat lebih menjamin kepastian hukum. Risalah Lelang yang merupakan akta otentik berfungsi sebagai *akta van transport* untuk kepentingan peralihan hak. KPKNL Jakarta V diharapkan menjadi akselerator agar paradigma lelang meresap kedalam "*mindset*" masyarakat, sehingga memandang lelang seperti pelaksanaan jual beli biasa dan dapat berperan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat.

D. SISTEMATIKA LAPORAN

Untuk memudahkan dalam memahami isi laporan, maka digunakan sistematika pelaporan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

BAB II Perencanaan Kinerja

BAB III Akuntabilitas Kinerja

BAB IV Penutup

Sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana yang ditetapkan dimaksud, selama tahun 2025 KPKNL Jakarta V telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang akan diuraikan dalam Bab II Laporan ini.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam upaya peningkatan kinerja KPKNL Jakarta V di tahun yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan strategis merupakan proses sistematis yang dilakukan organisasi untuk menentukan visi, misi, dan sasaran jangka panjang, serta menetapkan strategi untuk mencapainya.

Perencanaan strategis berfungsi sebagai 1) **Roadmap** dalam menentukan arah organisasi dalam 5 tahun ke depan (selanjutnya tertuang dalam Renstra 2025-2029); 2) **alat pengambilan keputusan** yang membantu pemimpin memprioritaskan alokasi sumber daya (anggaran dan sumber daya manusia) pada program yang paling berdampak; 3) **Integrasi Kebijakan** yang menyelaraskan tujuan unit (DJKN) dengan tujuan induk yang lebih besar (Kementerian Keuangan); serta sebagai 4) **Standar Kinerja** guna menetapkan indikator keberhasilan (seperti target digitalisasi lelang atau optimalisasi aset) agar efektivitas organisasi dapat diukur.

Rencana strategis DJKN berfokus pada dukungan terhadap visi dan misi Kementerian Keuangan untuk periode 2025-2029, dengan sasaran utama **pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, pembiayaan dan risiko yang akuntabel, prudent, dan inovatif, dan pencapaian tugas khusus yang efektif**.

Dalam mendukung sasaran utama dimaksud, maka DJKN memiliki Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis sebagai berikut.

Visi DJKN

Menjadi pengelola kekayaan negara, penilaian, dan lelang yang **akuntabel, produktif, dan inovatif** dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan.

Misi DJKN

Misi DJKN terdiri dari empat poin utama:

1. Mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial.
2. Mewujudkan layanan penilaian dan advisory yang profesional dan relevan untuk kepentingan negara.

3. Mewujudkan layanan lelang yang modern dan terpercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum.
4. Mewujudkan pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu.

Tujuan DJKN

Tujuan DJKN selaras dengan misinya, mencakup:

1. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial.
2. Layanan penilaian dan advisory yang profesional dan relevan untuk kepentingan negara.
3. Layanan lelang yang modern dan terpercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum.
4. Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima.

Sasaran Strategis

Sasaran strategis DJKN merupakan target yang lebih spesifik:

1. Pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan investasi yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial.
2. Layanan penilaian dan advisory yang profesional dan relevan.
3. Layanan lelang yang modern dan terpercaya.
4. Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif.

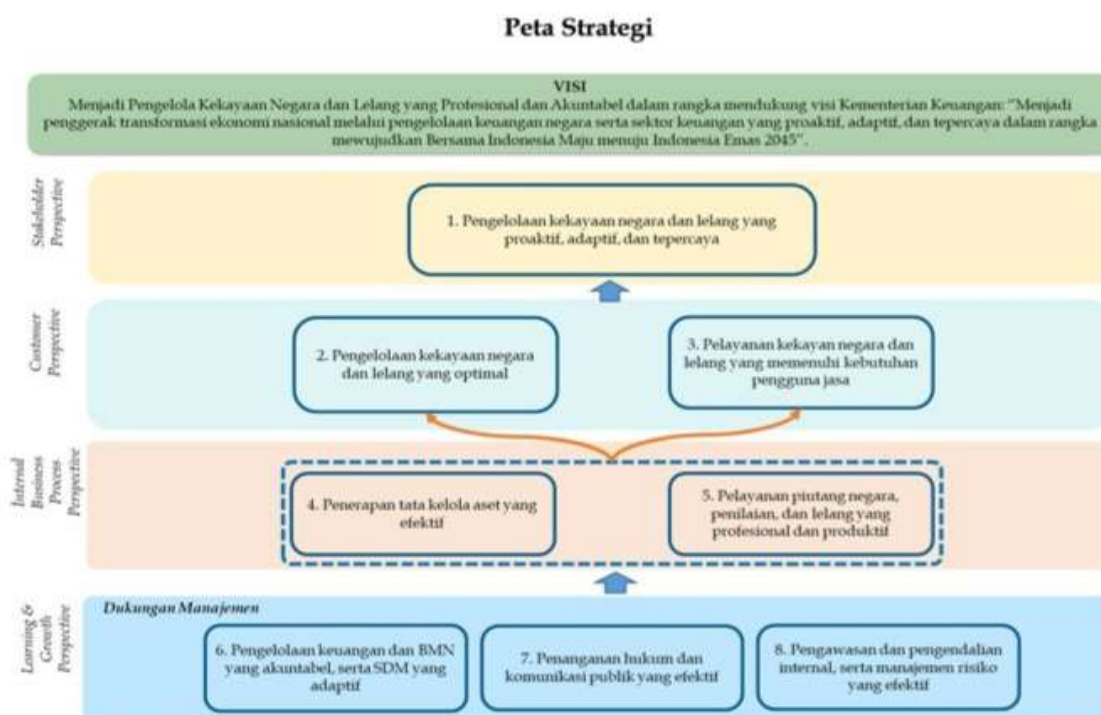
KPKNL Jakarta V sebagai unit vertikal di bawah DJKN Kementerian Keuangan mendukung penuh Rencana Strategis DJKN 2025 – 2029, dengan cara menetapkan sasaran dan target kinerja di tahun 2025.

Guna menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi KPKNL Jakarta V harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi.

Peta strategi *Kemenkeu Three* KPKNL Jakarta V tahun 2025 mempunyai 4 perspektif, yaitu: *Stakeholders Perspective*, *Customer Perspective*, *Internal Business Process Perspective*, dan *Learning and Growth Perspective*. Keempat perspektif tersebut kemudian diuraikan kedalam 8 (delapan) Sasaran Strategis (SS) dengan **Peta Strategi** sebagai berikut:

Visi KPKNL Jakarta V

Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka Mendukung visi Kementerian Keuangan “*Menjadi penggerak transformasi ekonomi nasional melalui pengelolaan keuangan negara serta sektor keuangan yang proaktif, adaptif dan terpercaya dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045*”.



B. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010.

Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi dalam hal ini KPKNL Jakarta V.

KPKNL Jakarta V memiliki beban tugas tersendiri yang telah diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara (**Kepdirjen**) Nomor 50/KN/2025 tentang Pembagian Tugas Pada Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagaimana diubah dengan Kepdirjen Nomor 113/KN/2025.

Dalam melaksanakan rencana kerja yang telah ditetapkan sebelumnya, KPKNL Jakarta V telah membuat suatu penetapan kinerja yang merupakan ikhtisar dari rencana kerja yang akan dicapai pada satu waktu tertentu. Penetapan Kinerja KPKNL Jakarta V tahun 2025 sesuai dengan Peta Strategis *Kemenkeu Three* Tahun 2025 terdiri dari 8 (delapan) Sasaran Strategis (SS) dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU). Rincian selengkapnya tentang SS dan IKU tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini:

Tabel 6
Penetapan Kinerja Berdasarkan Peta Strategis Tahun 2025

Kode	IKU	Polarisasi	V/C	Target s.d Triwulan IV
Stakeholder Perspective (30%)				
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya			
1a-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	Max	P/M	100,00%
1b-CP	Indeks Integritas	Max	P/L	100,00
1c-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	Max	P/M	100,00%
Customer Perspective (20%)				
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal			
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	Max	P/L	100,00%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	Max	P/L	100,00%
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	Max	P/M	100,00%
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa			
3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	Max	P/M	74,00
Internal Process Perspective (25%)				
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif			
4a-CP	Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan	Max	P/M	100,00%
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	Max	P/M	100,00%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif			
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	Max	P/M	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	Max	P/M	70%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	Max	P/M	80,00%
Learning and Growth Perspective (25%)				
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta			
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	Max	P/M	100,00
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	Max	P/M	100,00
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	Max	P/M	80,00%
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif			
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	Max	P/M	100,00
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	Max	P/M	80,00
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif			
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	Max	P/M	80,00
8b-N	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	Max	P/M	95,30%
8c-N	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	Max	P/M	100,00

Perjanjian Kinerja KPKNL Jakarta V mengalami satu kali *addendum*, yakni pada bulan November 2025 dengan kenaikan target pada IKU Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara.

Pada Perjanjian Kinerja yang pertama, target IKU Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara adalah sebesar Rp1,68 Triliun. Selanjutnya target di-*addendum* menjadi Rp2,44 Triliun. Kenaikan target IKU tersebut tidak menyurutkan kinerja KPKNL Jakarta V, meskipun *addendum* dilakukan pada bulan-bulan menjelang tahun berakhir.

KPKNL Jakarta V terus berupaya agar capaian IKU dimaksud dapat melampaui target yang telah ditetapkan, dan pada kenyataannya hal tersebut berhasil.

C. **PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**

Perjanjian Kinerja KPKNL Jakarta V Tahun 2026 disusun dengan mempertimbangkan amanat sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis DJKN 2025 – 2029 dengan mendukung penuh misi Kementerian Keuangan.

Visi KPKNL Jakarta V adalah menjadi pengelola kekayaan negara, penilaian, dan lelang yang **akuntabel, produktif, dan inovatif** dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan.

Peta strategi *Kemenkeu Three* KPKNL Jakarta V tahun 2026 mempunyai 4 perspektif, yaitu:

1. ***Stakeholder Perspective***

Fokus pada pihak-pihak eksternal seperti Direktorat Jenderal terkait, Kementerian/Lembaga, dan Masyarakat. Sasaran Strategisnya adalah Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang produktif dan kredibel.

2. ***Customer Perspective***

Fokus pada pengguna layanan langsung seperti Pemda/K/L, Swasta/Perbankan, dan Balai Lelang/Peserta Lelang. Sasaran Strategisnya adalah Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna layanan serta Pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang efektif.

3. ***Internal Process Perspective***

Fokus pada efisiensi dan efektivitas proses internal DJKN. Sasaran Strategis Penerapan tata kelola aset yang efektif serta Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif.

4. *Learning & Growth Perspective* (Dukungan Manajemen)

Fokus pada fondasi internal organisasi seperti SDM, keuangan, dan infrastruktur. Ini berfungsi sebagai dukungan fundamental untuk mencapai sasaran di perspektif lain. Sasaran Strategisnya adalah Pengelolaan SDM yang adaptif, keuangan yang akuntabel, dan BMN yang produktif, Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif, serta Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan evaluasi kinerja tahun 2025, terhadap 20 (dua puluh) IKU KPKNL Jakarta V Tahun 2025, keseluruhannya memperoleh hasil maksimal dengan persentase capaian kinerja $\geq 100\%$ (indikator warna hijau);

Adapun rincian tabel terhadap capaian kinerja atas 20 (dua puluh) IKU dimaksud adalah sebagai berikut :

Tabel 7
Capaian Kinerja Tahun 2025

NO.	IKU	TARGET	REALISASI	INDEKS (MAKS 120%)
Stakeholder Perspective (30%)				
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya			114,05
1a-CP	Tingkat kepuasan <i>stakeholder</i> dan pengguna layanan	100,00%	120,00%	120,00
1b-CP	Indeks Integritas	100,00	105,29	105,29
1c-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100,00%	132,66%	120,00
Customer Perspective (20%)				
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal			107,45
2a-CP	Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara	100,00%	112,71%	112,71
2b-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100,00%	103,53%	103,53
2c-CP	Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara	100,00%	105,63%	105,63
3	Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa			120,00

3a-CP	Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi	74,00	112,72	120,00
Internal Process Perspective (25%)				
4	Penerapan Tata Kelola Aset yang Efektif			115,77
4a-CP	Persentase BMN berupa tanah yang disertifikatkan	100,00%	121,27%	120,00
4b-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN	100,00%	111,54%	111,54
5	Pelayanan Piutang Negara, Penilaian dan Lelang yang Profesional dan Produktif			120,00
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	100%	138,19%	120,00
5b-CP	Tingkat Kualitas Layanan Penilaian	70%	111,83%	120,00
5c-CP	Persentase Produktivitas Lelang	80%	117,76%	120,00
Learning & Growth Perspective (25%)				
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif			117,50
6a-CP	Indeks Kualitas Kinerja Anggaran	100,00	120,00	120,00
6b-N	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	100,00	112,50	112,50
6c-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	80,00%	98,00%	120,00
7	Penanganan Permasalahan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif			117,36
7a-CP	Indeks Penanganan Permasalahan Hukum	100,00	114,73	114,73
7b-N	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80,00	110,00	120,00
8	Pengawasan dan Pengendalian Internal, serta Manajemen Resiko yang Efektif			114,98
8a-N	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Resiko	80,00	97,61	120,00
8b-N	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	95,30%	100,00%	104,93
8c-N	Indeks Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM	100,00	120,00	120,00
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)				115,59

Sementara itu, pada tahun 2024 KPKNL Jakarta V memiliki 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan hasil: 19 (sembilan belas) IKU memperoleh hasil maksimal dengan persentase capaian kinerja $\geq 100\%$ (indikator warna hijau), sementara 1 (satu) IKU memperoleh hasil capaian kinerja $\leq 100\%$ yaitu IKU persentase realisasi pokok lelang. Lebih lanjut dapat dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 8
Capaian Kinerja Tahun 2024

Kode	IKU	Target	Realisasi	Indeks Max. 120%
	Stakeholder Perspective (30%)			33,35%
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan			111,18%
1a-CP	Tingkat kepuasan <i>stakeholder</i> dan pengguna layanan	100%	112,19%	112,19%
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	142,53%	120,00%
1c-CP	Indeks integritas	89,17	92,44	103,67%
	Customer Perspective (20%)			22,52%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa			114,34%
2a-CP	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	71,5%	91,39%	120,00%
2b-CP	Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	86,5%	94,01%	108,68%
3	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang optimal			103,40%
3a-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	86,81%	86,81%
3b-CP	Persentase penurunan outstanding Piutang Negara	100%	144,22%	120,00%
4	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien			120,00%
4a-CP	Indeks Ketepatan Waktu Layanan Penilaian	75	98,00	120,00%
	Internal Process Perspective (25%)			29,00%
5	Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara yang efektif			120,00%

5a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%	120,39%	120,00%
5b-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	120,78%	120,00%
6	Penerapan tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif			108,01%
6a-CP	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	88%	85,536%	102,80%
6b-CP	Persentase produktivitas lelang	89%	100,76%	113,21%
6c-CP	Persentase produktivitas lelang	89%	100,76%	113,21%
7	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional			120,00%
7a-CP	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16%	0,03%	120,00%
Learning & Growth Perspective (25%)				29,34%
8	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif			118,44%
8a-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	90%	120%	120,00%
8b-N	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85,00	99,35	116,88%
9	Pengelolaan keuangan yang akuntabel			120,00%
9a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	120,00%
9b-CP	Deviasi data PNBPN Fungsional DJKN	10%	0,00	120,00%
10	Komunikasi publik yang efektif			120,00%
10a-N	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	100,00	120,00%
11	Pengawasan dan pengendalian Internal yang bernilai tambah			111,02%
11a-N	Indeks efektivitas UKI	82	98,66	120,00%
11b-N	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti	98,0%	100,00%	102,04%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)				114,21%

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 di atas, maka pada tahun 2025 terjadi peningkatan secara persentase capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO). Pada tahun 2024 NKO tercapai sebesar 114,21%, sementara pada tahun 2025 NKO naik menjadi 115,59%.

I. Hasil analisa dan evaluasi terhadap kinerja 8 (delapan) Sasaran Strategis beserta 20 (dua puluh) IKU Kemenkeu *Three* KPKNL Jakarta V Tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Sasaran Strategis : Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Proaktif, Adaptif, dan Terpercaya

1) IKU Tingkat Kepuasan *Stakeholder* dan Pengguna Layanan

Pelaksanaan Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan dan Pengguna Layanan Kemenkeu (SKPKPL) merupakan tolok ukur untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Kementerian Keuangan kepada masyarakat, pengguna layanan dan stakeholders. Dalam menyelenggarakan survei, untuk menjamin independensi, Kementerian Keuangan bekerjasama dengan lembaga/tim peneliti independen penyelenggara survei untuk dapat memperoleh nilai atau angka berupa Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL) dan Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (IKPK) serta penyelesaian rekomendasi perbaikan pada masing-masing Unit Eselon I/LNSW berdasarkan survei yang dilakukan pada kota-kota yang ditunjuk untuk dapat menggambarkan pelayanan Kemenkeu secara keseluruhan.

Pada tahun 2025, IKU Indeks Kepuasan *Stakeholder* dan Pengguna Layanan terdiri dari 3 komponen, yaitu:

- a) Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan/*Stakeholder* (IKPK)
- b) Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL)
- c) Tingkat Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi SKPL 2024

Adapun rekomendasi SKPL Tahun 2024 yang harus diselesaikan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 9
Rekomendasi SKPL

No	Rencana Tindak Lanjut	Dokumen yang diperlukan
1.	Penyampaian laporan secara berkala mengenai tindak lanjut atas pengelolaan saluran pengaduan yang dilaporkan oleh pengelola pengaduan kepada pimpinan unit	ND Penyampaian Laporan Pengaduan

2..	Pelaksanaan pelatihan maupun <i>sharing session</i> bagi pegawai mengenai pengelolaan pengaduan masyarakat.	UND/ND pelatihan beserta laporan pelaksanaan kegiatan dan dokumentasinya
3.	Publikasi Infografis layanan melalui berbagai media publikasi yang mudah diakses masyarakat	Dokumentasi publikasi pada APT dan media sosial
4.	Pelaksanaan pelatihan atau <i>sharing session</i> , bagi pegawai mengenai sistem, mekanisme, waktu, dan prosedur layanan	UND/ND pelatihan beserta laporan pelaksanaan kegiatan dan dokumentasinya
5.	Penetapan Rencana Pemantauan Tahunan beserta penyampaian laporan hasil pemantauan pengendalian utama	KEP Penetapan Pemantauan 2025 beserta Laporan hasil pemantauan
6.	Penyampaian laporan hasil pemantauan pengendalian utama mekanisme, dan prosedur layanan	Laporan hasil pemantauan secara berkala kegiatan dan dokumentasinya
7.	Pelaksanaan pelatihan maupun <i>sharing session</i> dengan tema anti korupsi dan gratifikasi	UND/ND pelatihan beserta laporan pelaksanaan kegiatan dan dokumentasinya

KPKNL Jakarta V telah menyelesaikan semua tindak lanjut rekomendasi SKPL tersebut dan dilanjutkan dengan pelaksanaan SKPL setiap triwulan sepanjang tahun 2025.

Pada tahun 2025 capaian terhadap IKU Tingkat kepuasan *Stakeholder* dan Pengguna Layanan terealisasi sebesar 120,00% dari Target 100,00% sehingga mencapai Nilai Indeks 120,00%.

Tabel 10
Capaian IKU Tingkat Kepuasan *Stakeholder*
dan Pengguna Layanan

KPKNL Jakarta V	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya							
	1a-CP Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	20%	50%	50%	70%	70%	100%	100%	
Realisasi	20%	92,31%	92,31%	92,31%	92,31%	120%	120%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Isu Utama	Tindakan yang Telah Dilaksanakan		
Tidak terdapat kendala dalam pencapaian target Q4	1. Persiapan pelaksanaan e skpl triwulan IV 2025 2. Pelaksanaan e skpl triwulan IV 2025		
Akar Masalah	Rekomendasi Rencana Aksi	UIC	Periode
	Persiapan pelaksanaan rekomendasi hasil SKPL 2025	Seluruh seksi dan jafung	2026

2) IKU Indeks Integritas

Pada tahun 2025 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyelenggarakan Survey Penilaian Integritas (SPI) dalam rangka mengukur indeks integritas pada seluruh Kementerian/Lembaga/Pemda sekaligus memetakan area rentan korupsi sebagai dasar membangun program penguatan budaya integritas yang tepat sasaran. Berdasarkan hasil SPI DJKN tahun 2024 yang disampaikan oleh Inspektur Jenderal melalui Nota Dinas nomor ND-61/IJ/2025 tanggal 26 Februari 2025 hal Penyampaian Hasil Survei Penilaian Integritas DJKN Tahun 2024, terdapat hasil sebagai berikut:

- a. Indeks penilaian integritas DJKN tahun 2024 adalah **87,49** dari skala 0 – 100 (semakin tinggi angka indeks menunjukkan tingkat risiko keterjadian korupsi yang semakin rendah). Nilai tersebut mengalami **kenaikan** sebesar 2,71 poin dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 84,79;
- b. Terdapat sejumlah upaya yang telah dilakukan terkait dengan isu integritas yang perlu **diapresiasi dan dipertahankan**, yaitu **peningkatan kuantitas dan kualitas sosialisasi antikorupsi**;

- c. Terdapat 3 dimensi dengan nilai tertinggi dan 3 dimensi dengan nilai terendah, yaitu:

Tabel 11
Hasil Survei Penilaian Integritas DJKN Tahun 2024

NILAI TERTINGGI		NILAI TERENDAH	
DIMENSI	NILAI	DIMENSI	NILAI
Integritas Pegawai (Eks)	98,97	Pengelolaan PBJ (Int)	79,14
Transparansi (Int)	95,35	Pengelolaan SDM (Int)	82,91
Perdagangan Pengaruh	95,19	Pengelolaan Anggaran (Int)	83,76

- d. Dari hasil analisis terhadap penilaian internal dan eksternal, diketahui bahwa terdapat beberapa **isu integritas yang perlu mendapat perhatian bersama** diantaranya:

Isu integritas pada penilaian internal antara lain:

- ✓ Isu perdagangan pengaruh berupa intervensi terhadap pengawasan UKI;
- ✓ Isu kurang sesuainya hasil pengadaan barang dan jasa;
- ✓ Isu penyalahgunaan anggaran berupa jamuan secara berlebihan;
- ✓ Isu pengelolaan SDM;
- ✓ Isu integritas dalam pelaksanaan tugas antara lain berupa penyelewengan perjalanan dinas dan penyalahgunaan fasilitas kantor, terutama kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi;
- ✓ Isu keteladanan dari pimpinan terkait pelaporan gratifikasi.

Isu integritas pada penilaian eksternal, yaitu:

- ✓ Isu pemberian layanan yang masih relatif lama, termasuk layanan konsultasi yang kurang responsif, serta *update* informasi terkait kebijakan/peraturan atas layanan yang belum secara proaktif disosialisasikan.

Mempertimbangkan kondisi-kondisi sebagaimana tercantum dalam laporan hasil SPI tahun 2024, seluruh unit di lingkungan DJKN agar dapat menindaklanjuti dengan melakukan langkah-langkah perbaikan bersama sebagaimana tertuang dalam matriks **rencana aksi perbaikan tindak lanjut atas hasil SPI tahun 2024** yang wajib dilakukan pada program kerja tahun 2025, yaitu:

Tabel 12
Rencana Aksi Tahun 2025

NO.	RENCANA AKSI	TARGET CAPAIAN
1.	Melakukan identifikasi titik rawan (<i>Risk Profiling</i>) praktik gratifikasi	Triwulan I
2.	<i>Campaign</i> /internalisasi pencegahan pelanggaran disiplin di lingkungan DJKN	Setiap Triwulan
3.	Pemetaan/identifikasi benturan kepentingan serta monitoring dan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan	Identifikasi:Triwulan II Monev:Triwulan III&IV
4.	Pimpinan unit kerja melakukan sosialisasi pesan/nilai-nilai antikorupsi kepada seluruh pegawai pada internal unit kerja	Triwulan II
5.	Pimpinan unit kerja melakukan sosialisasi dan/atau koordinasi untuk menyampaikan pesan/nilai-nilai antikorupsi kepada pihak eksternal	Triwulan II
6.	Internalisasi ketentuan dan kebijakan penggunaan fasilitas kantor terutama kendaraan dinas	Triwulan II
7.	Melakukan pemantauan identifikasi titik rawan praktik gratifikasi	Triwulan III
8.	Pelatihan/internalisasi mengenai mekanisme dan prosedur layanan serta pengelolaan pengaduan	Triwulan III
9.	Publikasi infografis layanan sebagai bentuk edukasi/sosialisasi prosedur layanan kepada pengguna layanan	Triwulan III
10.	Diseminasi kebijakan dan pengelolaan SDM terkait promosi/pola mutasi di lingkungan DJKN	Triwulan IV
11.	Melaksanakan evaluasi program "Tali Kasih" khususnya terkait proses penyaluran/penggunaan dana dan efektifitas dampak program kepada pihak yang membutuhkan.	Triwulan IV
12.	Pembinaan/ <i>workshop/sharing session</i> untuk meningkatkan kapasitas entitas Pengadaan Barang/Jasa	Triwulan IV

13.	Mewajibkan para pejabat dan pelaksana untuk mengikuti pelatihan penguatan integritas dan pencegahan korupsi	Triwulan IV
14.	Penerbitan naskah dinas pimpinan unit kerja yang memuat imbauan pengendalian gratifikasi dan penegasan agar tidak menjamu pimpinan secara berlebihan	Triwulan IV

Tindak lanjut rencana aksi perbaikan atas hasil SPI DJKN tahun 2024 diatas merupakan salah satu komponen pengukuran IKU Indeks Integritas dengan *trajectory* triwulan I s.d. IV tahun 2025. Adapun penyampaian bukti tindak lanjut telah disampaikan KPKNL Jakarta V melalui tautan https://bit.ly/TLSPI2024_DJKN.

Data hasil SPI dari KPK untuk DJKN tahun 2025 adalah **91,89** atau naik sebesar 4,4 poin dibandingkan tahun 2024 (87,49) dengan **hasil SPI Final** (setelah diperhitungkan faktor koreksi dan apresiasi) sebesar **94,09** atau mengalami peningkatan 1,65 poin dibandingkan tahun 2024 (92,44).

Dengan demikian, **capaian IKU Indeks Integritas Organisasi periode triwulan IV tahun 2025 untuk seluruh unit kerja DJKN sebesar 105,29%**. Adapun realisasi tindak lanjut atas total **14 rencana aksi** hasil SPI 2024 yang dilakukan selama tahun 2025 (salah satu variabel penilaian pada faktor apresiasi) telah **tuntas (100%)** dilaksanakan sesuai dengan *timeline* yang telah ditentukan

Tabel 13
Capaian IKU Indeks Integritas

KPKNL Jakarta V	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya							
	15-CP Indeks Integritas							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	
Realisasi	100	120	120	120	120	100		
Capaian	100%	120	120	120	120	100		
Isu Utama dan Implikasi								
Tidak terdapat kendala pada capaian Q4								
Akar Masalah								
Tindakan yang Telah Dilaksanakan								
1. mengadakan internalisasi/Sosialisasi terkait gratifikasi								
Rekomendasi Rencana Aksi			UIC		Periode			
1. Pelaksanaan SPI 2026			1. Seksi KI		2026			

3) **IKU Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang**

Dibandingkan dengan capaian tahun 2024, kinerja pada IKU Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang tetap menunjukkan hasil yang sangat baik dengan realisasi yang melampaui target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2024, dengan target penerimaan sebesar Rp53.450.000.000,00, realisasi penerimaan negara mencapai Rp65.004.202.749,00, atau setara dengan 142,53 persen dari target. Sementara itu, pada tahun 2025, dengan target penerimaan sebesar Rp60.245.680.000,00, realisasi kinerja tercatat sebesar Rp73.236.206.572,00, atau setara dengan 132,6 persen dari target. Meskipun secara persentase capaian mengalami variasi dibandingkan tahun sebelumnya, realisasi tahun 2025 tetap berada jauh di atas target dan mencerminkan kinerja yang kuat serta berkelanjutan dalam mendukung penerimaan negara.

Pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara dan lelang pada tahun 2025 menghadapi sejumlah tantangan yang memengaruhi potensi penerimaan negara. Isu utama yang dihadapi adalah masih terdapat beberapa satuan kerja yang belum menindaklanjuti Surat Persetujuan Pengelolaan BMN serta belum mengusulkan pengelolaan BMN yang telah memperoleh persetujuan. Kondisi ini berpotensi menunda realisasi penerimaan negara yang seharusnya dapat diperoleh dari kegiatan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN. Namun demikian, tantangan tersebut tidak menghambat pencapaian kinerja secara keseluruhan, mengingat masih terdapat kontribusi penerimaan yang signifikan dari satuan kerja lain yang telah menindaklanjuti persetujuan pengelolaan BMN secara optimal.

Dalam rangka pencapaian target kinerja pada IKU Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang, **Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN) KPKNL Jakarta V melaksanakan berbagai upaya *extra effort*** yang berfokus pada penguatan monitoring dan komunikasi dengan satuan kerja. Upaya tersebut dilakukan melalui pemantauan secara intensif terhadap tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN menggunakan aplikasi SIMAN, sehingga setiap persetujuan yang telah diterbitkan dapat dipantau status realisasinya secara berkelanjutan. Selain itu, Seksi PKN secara aktif melakukan konfirmasi berkala kepada satuan kerja terkait progres

tindak lanjut atas persetujuan pengelolaan BMN, baik dalam bentuk pemanfaatan maupun pemindahtanganan, untuk memastikan bahwa setiap potensi penerimaan negara dapat segera direalisasikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dari sisi analisis penyebab keberhasilan capaian kinerja, realisasi penerimaan negara yang pada tahun 2025 tetap melampaui 120 persen dari target menunjukkan bahwa mekanisme pengelolaan kekayaan negara dan lelang telah berjalan secara efektif dan konsisten. Kunci keberhasilan pencapaian indikator ini terletak pada intensitas tindak lanjut kepada satuan kerja atas persetujuan pengelolaan BMN yang telah diberikan, yang pada tahun 2025 tercermin dari 204 objek sewa dan 75 objek penjualan yang berhasil ditindaklanjuti. Tingginya realisasi tersebut menunjukkan bahwa sinergi antara Seksi PKN dan satuan kerja telah terbangun dengan baik, sehingga persetujuan yang diterbitkan tidak berhenti pada aspek administratif, tetapi benar-benar menghasilkan penerimaan negara yang nyata.

Dari sisi efisiensi penggunaan sumber daya, Seksi PKN KPKNL Jakarta V melaksanakan pembinaan, pengawasan, serta pengelolaan BMN terhadap 12 kementerian/lembaga dengan total 253 satuan kerja. Beban kerja yang relatif besar tersebut dapat dikelola secara efektif melalui pengaturan prioritas, pembagian tugas yang proporsional, serta pemanfaatan sistem informasi pengelolaan BMN sebagai alat monitoring dan pengendalian. Seluruh program dan kegiatan utama Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara dapat dilaksanakan secara efisien dengan mengoptimalkan anggaran yang tersedia, tanpa memerlukan tambahan alokasi khusus, sehingga setiap sumber daya yang digunakan mampu memberikan hasil yang maksimal terhadap pencapaian penerimaan negara.

Dalam hal pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko, Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara telah menerapkan langkah-langkah antisipatif melalui pemantauan berkelanjutan dan komunikasi aktif dengan satuan kerja. Pendekatan ini terbukti efektif dalam mengurangi risiko tidak terealisasinya penerimaan negara dari pengelolaan BMN yang telah memperoleh persetujuan, khususnya yang berpotensi tertunda akibat kendala administratif maupun keterlambatan tindak lanjut.

Ke depan, pada tahun 2026, Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara KPKNL Jakarta V akan terus menghimbau satuan kerja untuk segera menindaklanjuti persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN sebagai rencana aksi utama. Dengan penguatan koordinasi, monitoring yang lebih terarah, serta tindak lanjut yang lebih konsisten, diharapkan realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang dapat terus dioptimalkan secara berkelanjutan.

Tabel 14

Capaian IKU Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang

KPKNL Jakarta V	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya							
	1c-CP							
	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Realisasi	240,47%	130,80%	130,80%	127,45%	127,45%	132,6%	132,6%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Tidak ada kendala dalam pencapaian target di Q3 Target Q4 = Rp 111.145.680.000 Realisasi Q4 = Rp 147.445.883.525,40	
Tindakan yang Telah Dilaksanakan 1. Membuat daftar Debitur prioritas dengan kriteria jumlah utang yang besar, terdapat Penerbitan dan penyampaian surat penagihan serta pemanggilan penanggung utang secara berjenjang. 2. Pelaksanaan penelusuran aset dan klarifikasi data piutang bekerja sama dengan instansi terkait. Upaya eksekusi dan lelang terhadap barang jaminan yang telah clear and clean. 3. Hambauan kepada pemohon lelang utamanya lelang eksekusi pasal 6 UUHT untuk mengajukan permohonan dengan objek lelang yang siap jual. 4. monitoring tindak lanjut pada aplikasi siman dan melakukan konfirmasi berkala ke satuan kerja	

Akar Masalah Debitur dalam banyak kasus sudah tidak diketahui keberadaannya, pailit, atau tidak memiliki aset lagi Sebagian besar objek lelang masih dikuasai pihak debitur atau pihak ketiga. Terdapat beberapa Salter yang belum menindaklanjuti Surat Persetujuan pengelolaan BMN dan belum mengusulkan pengelolaan BMN.		
Rekomendasi Rencana Aksi 1. Menghimbau kepada Salter untuk segera menindaklanjuti persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain yang berpotensi pengurang utang - Mengusulkan pencegahan terhadap debitur-debitur prioritas 3. Surat Hambauan dan Rapat Moner kepada pemohon lelang utamanya lelang eksekusi pasal 6 UUHT untuk mengajukan permohonan dengan objek lelang yang siap jual	UIC Seksi PKN Seksi PN Jafung pelelang	Periode 2026

2. Sasaran Strategis: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal

1) IKU Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara

IKU Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara merupakan indikator baru yang belum diukur pada tahun 2024, sehingga capaian kinerja tahun 2025 menjadi *baseline* awal dalam menilai efektivitas pelaksanaan optimalisasi pengelolaan BMN di wilayah kerja KPKNL Jakarta V. Dengan target kinerja sebesar 100 persen, yang pada tahun 2025 ditetapkan setara dengan 92 NUP objek BMN yang menjadi sasaran optimalisasi, realisasi capaian mencapai 112,71 persen, atau setara dengan 101 NUP yang berhasil dioptimalkan. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya optimalisasi aset negara telah berjalan sangat baik dan mampu melampaui target yang ditetapkan.

Capaian kinerja tersebut diperoleh meskipun proses optimalisasi BMN memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi. Optimalisasi aset negara pada umumnya memerlukan tahapan birokrasi yang panjang serta koordinasi lintas pihak yang intensif. Selain itu, tidak seluruh BMN yang menjadi target optimalisasi dapat segera ditindaklanjuti, khususnya aset-aset yang berada di wilayah militer dengan akses terbatas. Kondisi tersebut menjadi isu utama dalam pelaksanaan indikator ini, karena memengaruhi kecepatan dan fleksibilitas proses optimalisasi. Namun demikian, tantangan tersebut dapat dikelola secara efektif sehingga tidak menghambat pencapaian kinerja secara keseluruhan.

Dalam rangka pencapaian target kinerja pada Indikator Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara, **Seksi PKN KPKNL Jakarta V melaksanakan berbagai upaya *extra effort*** yang difokuskan pada pemetaan bersama dengan satuan kerja terhadap objek Barang Milik Negara yang masih idle dan memiliki potensi untuk diberdayakan lebih lanjut. Pemetaan tersebut dilakukan melalui koordinasi langsung dengan satuan kerja guna mengidentifikasi aset yang secara administratif dan teknis memungkinkan untuk dioptimalkan. Selain itu, Seksi PKN juga menyampaikan surat permintaan konfirmasi kepada satuan kerja terkait objek BMN yang dapat dilakukan optimalisasi sebagai dasar dalam penetapan target dan penyusunan rencana tindak lanjut.

Dari sisi analisis penyebab keberhasilan kinerja, pemenuhan target optimalisasi NUP didasarkan pada hasil koordinasi dan pemetaan yang dilakukan secara komprehensif sesuai dengan rekomendasi satuan kerja. Pendekatan ini memastikan bahwa objek yang ditetapkan sebagai target optimalisasi benar-benar merupakan BMN yang memiliki potensi pemanfaatan atau penggunaan, sehingga proses optimalisasi dapat dilaksanakan secara tepat sasaran dan berkelanjutan.

Dari sisi efisiensi penggunaan sumber daya, optimalisasi objek BMN dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien melalui rapat koordinasi yang menghasilkan penetapan target NUP optimalisasi BMN serta rencana tindak lanjut atas NUP dimaksud. Dengan pendekatan tersebut, proses perencanaan dan pelaksanaan optimalisasi dapat dilakukan secara terarah tanpa memerlukan tambahan sumber daya yang signifikan, serta memaksimalkan hasil yang dicapai dari sumber daya yang tersedia.

Dalam hal pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko, Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara telah melakukan komunikasi dan koordinasi informal dengan satuan kerja terkait dengan pemetaan NUP BMN yang akan dijadikan target optimalisasi. Langkah ini memungkinkan potensi kendala dapat diidentifikasi sejak awal, sehingga risiko tidak tercapainya target dapat diminimalkan dan tindak lanjut dapat dilakukan secara lebih responsif.

Ke depan, pada tahun 2026, Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara KPKNL Jakarta V akan memastikan satuan kerja untuk melakukan optimalisasi BMN, baik dalam bentuk penggunaan maupun pemanfaatan, agar BMN tidak menjadi idle dan dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi negara.

Tabel 15
Capaian IKU Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara

KPKNL Jakarta V	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							
	2a-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%	
Realisasi	133,33%	214%	214%	132,91%	132,91%	112,71%	112,71%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	112,71%	112,71%	

Isu Utama dan Implikasi	Tindakan yang Telah Dilaksanakan		
Capaian TW 4 112,71%	Melakukan koordinasi dan Menyampaikan himbauan optimalisasi BMN kepada Satker		
Akar Masalah	Rekomendasi Rencana Aksi	UIC	Periode
-Optimalisasi BMN membutuhkan proses yang panjang dari segi birokrasi dan tidak semua BMN yang menjadi target dalam dilakukan optimalisasi dikarenakan berada di wilayah militer dengan akses terbatas	Berkoordinasi kembali dan menghimbau satker untuk segera melakukan optimalisasi BMN	Seksi PKN	2026

2) IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang

Lelang memiliki peranan dalam perekonomian nasional yaitu :

- 1) Pengelolaan Keuangan Negara melalui penjualan BMN/D, barang milik desa, barang milik BUMN/D, perorangan, aset harta pailit, barang temuan, aset dari tegahan Bea dan Cukai, aset bank dalam likuidasi, dan sebagainya.
- 2) Penegakan Hukum melalui berbagai jenis lelang eksekusi. Seperti Lelang Eksekusi PUPN, Lelang Eksekusi UUHT, Lelang Eksekusi Pengadilan, Rampasan Kejaksaan, Sitaan KPK, Gadai, Lelang PT Pegadaian, dan sebagainya.
- 3) Peningkatan Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi dengan membuka lapangan kerja bagi masyarakat di bidang lelang antara lain sebagai Pejabat Lelang Swasta (Kelas II), para pegawai Kantor PL II, mendukung penjualan barang UMKM, mendukung penjualan hasil hutan, dan sebagainya.

Pelaksanaan lelang memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional yakni didapatkan hasil lelang yang di representasikan oleh Pokok Lelang dan PNBP Lelang. Persentase hasil lelang diperoleh dari realisasi jumlah pokok lelang terhadap target. Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif. Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang.

Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL) Kelas I dan Pejabat Lelang (PL) Kelas II dalam periode tertentu.

Pada tahun 2025 capaian terhadap IKU Presentase Realisasi Pokok Lelang terealisasi sebesar 103,53% dari Target 100% sehingga mencapai Nilai Indeks 103,53%.

Tabel 16
Capaian IKU Persentase Realiasi Pokok Lelang

KPKNL Jakarta V	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							
	2b-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Realisasi	436,23%	100,03%	100,03%	101,54%	101,54%	103,53%	103,53%	
Capaian	128%	100,03%	100,03%	101,54%	101,54%	103,53%	103,53%	

Isu Utama dan Implikasi		Tindakan yang Telah Dilaksanakan	
Tidak ada kendala dalam pencapaian target di Q3 Target Q4 = Rp 894.000.000.000,00 Realisasi Q4 = Rp 925.570.391.483,00		1. Pelaksanaan Lelang yang makin produktif.	

Akar Masalah		Rekomendasi Rencana Aksi	UIC	Periode
Tidak ada masalah		1. Peran stakeholder dalam menetapkan nilai limit mengikuti adanya program efisiensi disegala lini, 2. Menyiapkan sarana untuk katalog lelang. 3. Sistem kendali administrasi minuta risalah lelang	Jafung Pelelang	2026

3) IKU Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara

IKU Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara menggambarkan efektifitas kinerja PUPN dalam melakukan pengurusan piutang Negara yang diserahkan oleh K/L/Pemda/BUN maupun pengurusan piutang Negara yang diserahkan oleh badan/lembaga khusus/badan hukum publik berdasarkan PP 28/2022 jls. PMK 52/2024 yang ditandai dengan adanya penurunan nilai saldo piutang Negara yang diurus PUPN.

Kriteria pengakuan capaian atas IKU yaitu untuk seluruh berkas piutang Negara yang ada pada aplikasi *FocusPN*, dengan komponen:

1. PNDS/Piutang Negara Dapat Disetor (Angsuran/Pembayaran (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat) atau Pelunasan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
2. Penarikan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
3. Pengembalian (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
4. PSBDT (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
5. Koreksi karena kekeliruan pencatatan dari Penyerah Piutang atau KPKNL;

Pembayaran angsuran atau pelunasan yang dapat diperhitungkan termasuk berasal dari:

1. Hasil lelang PUPN terhadap Barang Jaminan/Harta Kekayaan Lain, termasuk lelang yang tidak terjual pada lelang berikutnya Penyerah Piutang menjadi pembeli;
2. Hasil pengalihan hak secara paksa terhadap Barang Jaminan/Harta Kekayaan Lain dengan kriteria khusus (*debt to asset swap*);
3. Hasil penjualan tanpa melalui lelang dan penebusan.

Target di 2025 persentase realisasi penurunan saldo piutang negara Rp 1,68 T.

Tujuan IKU Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara adalah Percepatan penurunan saldo piutang Negara pada K/L/Pemda maupun piutang Negara pada badan/lembaga khusus/badan hukum publik yang sedang diurus PUPN.

Pada tahun 2025 capaian terhadap IKU Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara terealisasi sebesar 105,63% dari Target 100% sehingga mencapai Nilai Indeks 105,63%.

Tabel 17

**Capaian IKU Persentase Realisasi Penurunan Nilai
Saldo Piutang Negara**

KPKNL Jakarta V	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							
	2c-CP Persentase penurunan outstanding Piutang Negara							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Realisasi	121,07%	118,06%	118,06%	223,46%	223,46%	105,63%	105,63%	
Capaian	120%	118,06%	118,06%	120%	120%	105,63%	105,63%	

Isu Utama dan Implikasi	Tindakan yang Telah Dilaksanakan
-tidak ada kendala dalam pencapaian target s.d Q4 Target s.d Q4 = Rp 2.439.139.356.136,77 Realisasi Q4 = Rp 2.584.717.539.822,91	1. Melakukan verifikasi dan pengecekan terhadap berkas-berkas yang memiliki potensi untuk dapat diselesaikan (Lunas, pengembalian, PSBDT, atau penarikan berkas) 2. Membuat daftar Debitur dengan utang <50 juta untuk dapat ditingkatkan pengurusannya ke tahap Surat Pakse

Akar Masalah	Rekomendasi Rencana Aksi	UIC	Periode
	1. Melakukan penelitian lapangan dan pemeriksaan terhadap barang jaminan dan/atau HKL pengurus/penanggung jawab utang 2. Melaksanakan lelang barang jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain yang berpotensi dapat menjadi pengurang utang. 3. Mengusulkan tindakan keperdataan dan pencegahan terhadap debitur-debitur prioritas	Seksi PN	Tahun 2026

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

3. Sasaran Strategis: Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa

1) IKU Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi

Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi mengukur efektivitas dari pelaksanaan edukasi dan komunikasi yang dilakukan DJKN kepada baik pihak eksternal maupun internal untuk menunjang tingkat pemahaman pelaku proses bisnis di internal DJKN dan pengguna layanan DJKN sehingga berdampak pada meningkatnya capaian kinerja secara DJKN umum.

IKU ini di KPKNL terdiri dari 2 komponen antara lain:

- Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi Jafung Pelelang;
- Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi Pengelolaan Piutang Negara.

Tujuan IKU ini adalah untuk mengukur peningkatan pemahaman/pengetahuan *stakeholders* dan internal DJKN terhadap ketentuan dan layanan terkait pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang sehingga berdampak pada optimalisasi pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang.

Pada tahun 2025 capaian terhadap IKU Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi terealisasi sebesar 112,72 dari Target 74,00 sehingga mencapai Nilai Indeks 120,00%.

Tabel 18
Capaian IKU Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi

KPKNL Jakarta V	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif							
	3a-N Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	74	74	74	74	74	74	74	
Realisasi	90	107	107	112,72	112,72	112,72		
Capaian	120%	120	120	120	120	120		

Isu Utama dan Implikasi		Tindakan yang Telah Dilaksanakan		
Capaian Triwulan III tidak terdapat kendala		1. Memberikan edukasi dan sosialisasi kepada PIC Pemohon Lelang baru		
Akar Masalah		Rekomendasi Rencana Aksi	UIC	Periode
tidak ada		1. Edukasi dan sosialisasi PMK tentang lelang kepada PIC Pemohon Lelang baru	Jafung pelelang dan Seksi PN	Triwulan IV 2025

4. Sasaran Strategis: Penerapan Tata Kelola Aset yang Efektif

1) IKU Persentase BMN berupa Tanah yang Disertifikatkan

Dibandingkan dengan capaian tahun 2024, kinerja pada IKU ini menunjukkan peningkatan yang positif dan konsisten. Pada tahun 2024, dengan target sertifikasi sebanyak 103 bidang tanah, realisasi yang dicapai adalah 124 bidang, atau setara dengan 120,39 persen dari target. Sementara itu, pada tahun 2025, dengan target sertifikasi sebanyak 362 NUP, realisasi kinerja meningkat menjadi 439 NUP, atau setara dengan 121,27 persen dari target. Peningkatan capaian tersebut menunjukkan bahwa upaya sertifikasi BMN berupa tanah tidak hanya mampu dipertahankan, tetapi juga ditingkatkan kualitas dan efektivitas pelaksanaannya secara berkelanjutan.

Pelaksanaan sertifikasi BMN berupa tanah pada tahun 2025 berjalan dengan sangat baik dan tidak menghadapi kendala signifikan. Hal ini mencerminkan bahwa proses bisnis sertifikasi yang telah dibangun dan disempurnakan pada tahun-tahun sebelumnya semakin matang dan terinternalisasi dalam

pelaksanaan tugas sehari-hari. Kesiapan data dan dokumen pertanahan, serta kepastian alur koordinasi antar pihak terkait, menjadi faktor penting yang mendukung kelancaran pencapaian indikator kinerja ini.

Dalam rangka pencapaian target kinerja pada Indikator Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan, **Seksi PKN KPKNL Jakarta V melaksanakan berbagai upaya *extra effort*** yang berfokus pada penguatan koordinasi dengan Kantor Pertanahan dan satuan kerja terkait dalam rangka memastikan kelengkapan dokumen sertipikasi BMN serta pelaksanaan penelitian lapangan. Selain itu, dilakukan pemutakhiran data tanah secara berkelanjutan pada aplikasi SIMAN sebagai basis data utama pengelolaan BMN, serta monitoring berkala terhadap progres sertipikasi guna memastikan setiap tahapan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Dari sisi analisis penyebab keberhasilan kinerja, capaian sertipikasi BMN pada tahun berjalan didukung oleh kelengkapan data administrasi yang semakin baik serta koordinasi yang intensif dengan Kantor Pertanahan dan satuan kerja. Sinergi antar pihak memungkinkan permasalahan teknis dan administratif dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan, sehingga proses sertipikasi dapat berjalan secara lancar dan tepat waktu.

Dari sisi efisiensi penggunaan sumber daya, kegiatan sertipikasi tanah dapat dilaksanakan secara efektif melalui rapat koordinasi yang menghasilkan penetapan prioritas bidang tanah dan jadwal tindak lanjut, serta pemanfaatan data pada aplikasi SIMAN sebagai sarana pengendalian dan monitoring. Dengan pendekatan ini, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan tanpa memerlukan tambahan biaya yang signifikan, sekaligus memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan memberikan hasil yang maksimal.

Dalam hal pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko, Seksi PKN telah melakukan analisis atas langkah-langkah yang telah disusun, meliputi penyusunan dan verifikasi dokumen, mediasi dengan pihak ketiga untuk BMN yang bermasalah atau dikuasai pihak lain, serta pemutakhiran data di SIMAN. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai efektivitas langkah yang telah dilakukan, mengidentifikasi kendala yang muncul, meminimalkan risiko, dan memastikan bahwa pencapaian kinerja berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Ke depan, pada tahun 2026, Seksi PKN KPKNL Jakarta V akan memastikan satuan kerja segera melengkapi dokumen sertipikasi BMN pada bidang tanah

yang *free and clear*, melakukan mediasi untuk BMN yang bermasalah atau dikuasai pihak ketiga, serta terus melakukan pemutakhiran data di SIMAN agar informasi seluruh BMN bidang tanah menjadi lebih valid dan akurat. Dengan langkah tersebut, diharapkan proses sertipikasi tanah BMN dapat semakin optimal dan berkelanjutan.

Tabel 19
Capaian IKU Persentase BMN berupa Tanah yang Disertifikatkan

KPKNL Jakarta V	Penerapan tata kelola aset yang efektif							
	4a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertifikatkan							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pel/KP
Target	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%	
Realisasi	39%	51,66%	51,66%	74,03%	74,03%	121,27%	121,27%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Isu Utama dan Implikasi	Tindakan yang Telah Dilaksanakan
Tidak ada kendala dalam pencapaian target Q4 Realisasi +439 Target Q4+ 362	Melakukan one on one meeting dengan Satker yang memiliki target Sertifikasi BMN, Berkoordinasi dengan Kantah dalam rangka percepatan progress sertipikasi BMN yang menjadi target

Akar Masalah	Rekomendasi Rencana Aksi	UIC	Periode
	Meningkatkan koordinasi dengan Satker dan Kantor Pertanahan	Seksi PKN	2026

2) IKU Persentase Evaluasi Kinerja BMN

Dibandingkan dengan capaian tahun 2024, kinerja pada IKU ini menunjukkan kesinambungan yang baik dengan tetap melampaui target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2024, dengan target evaluasi terhadap 51 NUP sebagai basis pengukuran setara 100 persen, realisasi evaluasi kinerja BMN mencapai 60 NUP, atau setara dengan 120,78 persen dari target. Sementara itu, pada tahun 2025, dengan target evaluasi terhadap 680 NUP aset BMN, realisasi kinerja tercatat sebesar 701 NUP, atau setara dengan 111,54 persen dari target. Meskipun secara persentase capaian mengalami variasi dibandingkan tahun sebelumnya, capaian tahun 2025 tetap menunjukkan kinerja yang sangat baik dan mencerminkan keberlanjutan kualitas pelaksanaan evaluasi kinerja BMN di wilayah kerja KPKNL Jakarta V.

Pelaksanaan evaluasi kinerja BMN pada tahun 2025 berjalan tanpa kendala signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa proses evaluasi kinerja BMN telah terbangun secara sistematis dan terintegrasi dalam pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara. Kesiapan perencanaan serta kejelasan kriteria objek yang menjadi sasaran evaluasi menjadi faktor pendukung utama dalam menjaga kelancaran pelaksanaan indikator kinerja ini.

Dalam rangka pencapaian target kinerja pada Indikator Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset), **Seksi PKN KPKNL Jakarta V melaksanakan berbagai upaya *extra effort*** yang berfokus pada penguatan komunikasi dan koordinasi dengan satuan kerja yang akan dijadikan target evaluasi kinerja BMN. Koordinasi tersebut dilakukan untuk memastikan kepastian dan kebenaran pencatatan aset pada master aset, sekaligus melakukan penelusuran jumlah aset yang sesuai dengan target evaluasi. Dengan pendekatan ini, data yang digunakan dalam proses evaluasi dapat dipastikan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dari sisi analisis penyebab keberhasilan kinerja, capaian indikator ini didukung oleh upaya analisis yang dilakukan melalui penelusuran dan pemetaan aset hingga ke tingkat satuan kerja. Proses pemetaan tersebut memungkinkan Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kondisi dan sebaran aset, sehingga penetapan objek evaluasi dapat dilakukan secara tepat sasaran dan sesuai dengan prioritas pengelolaan BMN.

Dari sisi efisiensi penggunaan sumber daya, kegiatan evaluasi kinerja BMN dapat dilaksanakan secara efektif melalui rapat koordinasi yang menghasilkan penetapan prioritas aset yang akan dievaluasi. Dengan mekanisme tersebut, proses perencanaan dan pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan secara terarah, meminimalkan penggunaan sumber daya yang tidak perlu, serta memastikan bahwa setiap kegiatan memberikan hasil yang optimal.

Dalam hal pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko, Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara telah menyusun analisis rencana aksi berupa pemetaan lokasi aset dan jumlah total aset sesuai target yang akan dilakukan survei lapangan untuk evaluasi kinerja BMN. Mitigasi risiko dilakukan melalui penguatan komunikasi dan koordinasi dengan satuan kerja agar surat rekomendasi KPKNL dapat segera ditindaklanjuti dan tidak melebihi batas waktu yang telah

ditetapkan. Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga kesinambungan proses evaluasi dan memastikan bahwa hasil evaluasi dapat segera dimanfaatkan.

Ke depan, pada tahun 2026, Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara KPKNL Jakarta V akan memastikan satuan kerja segera menindaklanjuti surat rekomendasi KPKNL serta memperluas cakupan aset yang akan dilakukan evaluasi kinerja. Dengan memetakan lebih banyak aset sebagai objek evaluasi, diharapkan kualitas pengelolaan BMN dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

Tabel 20
Capaian IKU Persentase Evaluasi Kinerja BMN

KPKNL Jakarta V	Penerapan tata kelola aset yang efektif							
	4b-CP Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	15%	50%	50%	75	75%	100%	100%	
Realisasi	15,74%	114,12%	114,12%	96,37%	96,37%	111,54%	111,54%	
Capaian	104,9%	120%	120%	120%	120%	111,54%	111,54%	

Isu Utama dan Implikasi	Tindakan yang Telah Dilaksanakan		
Tidak ada kendala dalam pencapaian target Q4	- Melakukan Pemetaan NUP target sesuai dengan kriteria BMN yang akan dilakukan evaluasi dan Berkoordinasi dengan Satker dalam rangka pemenuhan informasi yang dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan evaluasi kinerja BMN		
Akar Masalah	Rekomendasi Rencana Aksi	UIC	Periode
-	- Meningkatkan Koordinasi dengan satuan kerja dalam pemenuhan kebutuhan data dan tindak lanjut rekomendasi evaluasi kinerja BMN	1. Seksi PKN	2026

5. Sasaran Strategis: Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang yang Profesional dan Produktif

1) **IKU Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)**

IKU Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara menggambarkan upaya PUPN berdasarkan UU Prp 49 Tahun 1960 jis. PP No. 28 Tahun 2022 jis. PMK 240/PMK.06/2016 jis. PMK No. 52/2024 melakukan pengurusan piutang negara maupun piutang badan/lembaga khusus/badan hukum publik, mulai dari penerimaan BKPN sampai dengan tahap selesai atau optimal. Selain itu, juga menggambarkan K/L /Pemda mengupayakan penyelesaian piutang Negara yang tidak dapat diserahkan ke PUPN secara optimal berdasarkan PMK

163/PMK.06/2020 atau PMK No. 137/PMK.06/2022.

Komponen perhitungan Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara sebagai kriteria capaian IKU berupa :

1. Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara melalui PUPN yang menghasilkan penerimaan Negara (bobot komponen : 1,2)
 - a. Pelunasan berupa penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas (SPPNL);
 - b. Penarikan berupa penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Selesai (SPPNS);
 - c. Koreksi Data (Berkas piutang Negara telah diterbitkan SPPNL/SPPNS di tahun berjalan dan tahun sebelumnya yang belum tercatat).
2. Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara melalui PUPN Tidak Menghasilkan penerimaan Negara (bobot komponen : 1,1)
 - a. Pengembalian berupa penerbitan Surat Pengembalian Pengurusan Piutang Negara (SPPPN);
 - b. Pengurusan piutang Negara telah optimal berupa penerbitan Pernyataan Piutang Sementara Belum Dapat Tertagih (PSBDT);
 - c. Koreksi Data (Berkas piutang Negara telah diterbitkan SPPPN/PSBDT di tahun berjalan dan tahun sebelumnya yang belum tercatat).
3. Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara yang tidak dapat diserahkan ke PUPN telah optimal (bobot komponen : 1)
 - a. Berkas Piutang Negara pada K/L telah optimal berupa penerbitan Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal (PPNTO);
 - b. Berkas Piutang Negara pada Pemda telah optimal berupa penerbitan Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO);yang terbit di tahun berjalan atau tahun sebelumnya serta belum tercatat di aplikasi focusPN. PPNTO dan PPDTO diupload pada aplikasi focusPN dan dapat diperhitungkan sebagai capaian setelah dilakukan review oleh Bidang PN Kanwil DJKN dan di validasi oleh Dit. PKKN.

Target di 2025 sejumlah 730 (tujuh ratus tiga puluh) Berkas Piutang Negara Diselesaikan berasal dari Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara melalui PUPN yang menghasilkan penerimaan Negara dan Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara melalui PUPN Tidak Menghasilkan penerimaan Negara.

Tujuan IKU ini adalah untuk Percepatan penyelesaian piutang Negara yang diurus oleh PUPN dan piutang Negara yang dikelola oleh K/L/Pemda/badan/lembaga khusus/badan hukum public.

Pada tahun 2025 capaian terhadap IKU Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara terealisasi sebesar 138,19% dari Target 100,00% sehingga mencapai Nilai Indeks 120,00%.

Tabel 21
Capaian IKU Realisasi Penyelesaian Berkas Kasus
Piutang Negara (BKPN)

KPKNL Jakarta V	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
	Sa-CP Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara:							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pel/XP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Realisasi	164,11%	156,41%	156,41%	103,60%	103,60%	138,19%	138,19%	
Capaian	130%	120%	120%	103,60%	103,60%	120%	120%	
Isu Utama dan Implikasi					Tindakan yang Telah Dilaksanakan			
Tidak ada kendala dalam pencapaian target Q4 Realisasi Q4 = 1008,8 Target Q4 = 730					Melakukan verifikasi dan pengecekan terhadap berkas-berkas yang memiliki potensi untuk dapat diselesaikan (Lunas, pengembalian, PSBDT, atau penarikan berkas). Membuat daftar Debitur dengan utang <50 juta untuk dapat ditingkatkan pengurusannya ke tahap Surat Paksa			
Akar Masalah					Rekomendasi Rencana Aksi		UIC	Periode
-					1. Menerbitkan tagihan kepada debitur. 2. Menalkan tahapan pengurusan piutang negara sampai dengan Surat Paksa. 3. Melakukan kajian kemungkinan diterbitkan PSBDT		Seksi PN	2025

2) IKU Tingkat Kualitas Layanan Penilaian

Pada tahun 2025 capaian terhadap IKU Tingkat Kualitas Layanan Penilaian adalah 106,71% dengan rincian rata-rata indeks penyelesaian layanan penilaian 91,90%, Komponen akurasi data layanan penilaian 108,18% dan komponen hasil kaji ulang 100%. Dari sisi IKU, capaian tahun 2025 tidak bisa dibandingkan dengan capaian 2024 karena terdapat perbedaan nama IKU dan formula IKU. Dimana pada tahun 2024 capaian IKU hanya dihitung dari tingkat kualitas layanan penilaian yaitu jumlah hari penyelesaian laporan penilaian dibandingkan dengan SOP penyelesaian laporan penilaian. Dalam IKU tahun 2025, penyelesaian laporan penilaian tersebut menjadi bagian dari IKU Tingkat kualitas layanan penilaian. Semakin cepat penyelesaian laporan akan semakin baik tingkat kualitas layanan penilaian.

Jumlah laporan yang dihasilkan pada tahun 2025 berjumlah 303 laporan penilaian. Sebagian besar sekitar 70,6 % atau sekitar 214 laporan penilaian dalam rangka pemanfaatan sewa, 24 laporan penilaian merupakan laporan penilaian barang jaminan/harta kekayaan lain dalam rangka pengurusan piutang negara serta laporan penilaian aset property eks BPPN. Sisanya adalah laporan penilaian dalam rangka pemindahtanganan BMN dan dalam rangka penyusunan neraca dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Upaya Pencapaian Target

Melakukan kerjasama yang baik antar Penilai Pemerintah di lingkungan KPKNL Jakarta V dan koordinasi dengan pemohon seperti Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara, Seksi Piutang Negara dan pemangku kepentingan lainnya.

Analisis Keberhasilan Pencapaian Target

Dukungan sumber daya manusia yakni jumlah penilai pemerintah adalah salah satu penentu keberhasilan pencapaian target kinerja. KPKNL Jakarta V memiliki dua penilai pemerintah ahli muda dan tiga penilai pemerintah ahli pertama. Jika diperlukan maka terdapat bantuan tenaga dari unit kerja lain seperti Direktorat Penilaian, Kanwil DJKN, dan/atau KPKNL yang objeknya berada pada beberapa lokasi unit kerja lain berada.

Sementara itu, guna mendukung kegiatan penilaian, maka dukungan anggaran adalah juga sangat penting. Dalam kurun waktu selama 2025, realisasi anggaran perjalanan dinas Rp116.384.000 atau sekitar 77% dari DIPA anggaran tahun 2025.

Rencana Aksi yang Akan dilakukan

Rencana kedepan selama tahun 2026 adalah menyelesaikan permohonan dan penugasan penilaian secepat mungkin dengan memperhatikan proses bisnis penilaian. Disamping itu menyelesaikan IKU mandatori dari Direktorat Penilaian.

Pada tahun 2025 capaian terhadap IKU Tingkat Kualitas Layanan Penilaian terealisasi sebesar 111,83% dari Target 70,00% sehingga mencapai Nilai Indeks 120,00%.

Tabel 22
Capaian IKU Tingkat Kualitas Layanan Penilaian

KPKNL Jakarta V	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
	5b-CP Tingkat kualitas layanan penilaian							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	
Realisasi	106,04%	105,63%	105,61	105,63%	105,63%	111,83%	111,83%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Isu Utama dan Implikasi	Tindakan yang Telah Dilaksanakan
Capaian Triwulan IV tidak terdapat kendala	1. Melakukan koordinasi dengan pemohon penilaian untuk melakukan input permohonan pada SIP

Rekomendasi Rencana Aksi	UIC	Periode
Himbauan kepada pemohon penilaian untuk melakukan input permohonan penilaian pada SIP. Pegaturan agar penyelesaian laporan penilaian tidak melebihi SOP	Jafung Penilai	2026

Akar Masalah
Tidak ada

3) IKU Persentase Produktivitas Lelang

Pengelolaan lelang yang optimal adalah melaksanakan lelang yang mengedepankan kompetitif, akuntabel, transparan, dengan harga tertinggi serta berkontribusi kepada penerimaan negara. Pengelolaan lelang meliputi perhitungan pada jumlah pokok lelang, PNBP lelang dan produktivitas lelang yang dihasilkan dari hasil pelaksanaan lelang oleh KPKNL (Pejabat Lelang Kelas I/JF Pelelang), Pejabat Lelang Kelas II dan Pegadaian. Perhitungan pengelolaan lelang diharapkan dapat mengukur tingkat optimalisasi penyelenggaraan lelang.

Tujuan IKU Persentase Produktivitas Lelang adalah agar lelang semakin dikenal dan digunakan oleh masyarakat sebagai salah satu media transaksi jual beli yang akuntabel, efisien, dan efektif.

Capaian kinerja bidang lelang selama lima tahun terakhir (2021 sd 2025) dapat digambarkan sebagai berikut.



Upaya Pencapaian Target

1. Percepatan potensi Lelang laku
 - Melakukan percepatan penetapan jadwal lelang untuk objek lelang dengan potensi laku terjual sangat tinggi
2. Edukasi AYDA (Agunan Yang Diambil Alih)
 - Memberikan edukasi dan komunikasi kepada stakeholder perbankan untuk upaya melakukan AYDA melalui Lelang
3. Nilai Limit Yang Kompetitif
 - Mendorong penjual atau pemohon lelang untuk menetapkan nilai limit dengan nilai yang kompetitif yang mengundang masyarakat untuk minat membeli melalui lelang
4. Penggalan Potensi Lelang
 - Melakukan penggalan potensi lelang kepada stakeholder yang belum pernah melakukan lelang

Analisis Keberhasilan Pencapaian Target

1. *Open* Informasi dan Layanan
Layanan diberikan dengan purna dan informasi pelaksanaan lelang dan objek lelang didorong untuk lebih terbuka dan tersebar dengan luas.
2. AYDA (Agunan Yang Diambil Alih)
Mendorong pemohon lelang perbankan untuk lebih aktif membeli objek lelang dengan mekanisme AYDA.
3. Dukungan Sumber Daya Manusia
KPKNL Jakarta V didukung oleh sejumlah Pelelang handal yang terdiri dari

satu Pelelang Ahli Madya, tiga Pelelang Ahli Muda, tiga Pelelang Ahli Pertama. Kesemuanya memberikan kehandalan dalam melaksanakan proses bisnis lelang dengan percepatan layanan dan pelayanan.

4. Dukungan Program

Edukasi dan Komunikasi yang berkesinambungan kepada *stakeholder* dan masyarakat memberikan dampak bagi sukses penyelenggaraan Lelang.

Rencana Aksi yang Akan dilakukan

1. Edukasi dan Komunikasi

Program Edukasi dan Komunikasi pada Tahun 2025 akan tetap dilanjutkan pada Tahun 2026.

2. AYDA (Agunan Yang Diambil Alih)

Mendorong kepada stakeholder perbankan untuk melakukan AYDA apabila lelang telah dilaksanakan lebih dari tiga kali Tidak Ada Penawaran.

3. Penggalan Potensi Lelang

Penggalan potensi lelang kepada stakeholder yang tidak/belum melaksanakan lelang

4. Percepatan Potensi Lelang Laku

Mendorong percepatan pelaksanaan lelang dengan potensi laku yang tinggi

5. Informasi yang Terbuka

Menyebarkan informasi lelang lebih terbuka kepada masyarakat termasuk memberikan layanan bimbingan teknis kepada masyarakat tentang *website* lelang

6. **Sasaran Strategis: Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel serta SDM yang Adaptif**

1) IKU Indeks Kualitas Kinerja Anggaran

Indeks Kinerja Anggaran mengukur kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Ruang lingkup perhitungan Indeks Kinerja Anggaran (IKA) meliputi perhitungan terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup nilai kinerja perencanaan anggaran dan nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran yang ada pada unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai dengan regulasi nasional. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat,

efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Ruang lingkup perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 Tahun 2023 pasal (7) Nilai kinerja anggaran (NKA) Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan hasil penjumlahan dari:

- 1) 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- 2) 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Selanjutnya untuk melihat komponen Indeks Kinerja Anggaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 23
Komponen Indeks Kinerja Anggaran

Indikator IKU Indeks Kinerja Anggaran			Capaian s.d Triwulan IV
A. Nilai IKPA			100.00%
		Revisi DIPA	92.50%
		Deviasi Hal III DIPA	100.00%
		Belanja Kontraktual	100.00%
		Pengelolaan UP dan TUP	100.00%
		Dispensasi SPM	100.00%
		Penyerapan Anggaran	96.44%
		Penyelesaian Tagihan	100.00%
		Capaian Output	100.00%
B. Nilai SMART			100.00%
Nilai Capaian IKU IKA s.d Triwulan IV			120.00%

Tabel 24
Capaian IKU Indeks Kinerja Anggaran

KPKNL Jakarta V	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							
5a-CP Indeks kualitas kinerja anggaran								
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	
Realisasi	120	120	120	120	120	120	120	
Capaian	120%	120	120	120	120	120	120	
Isu Utama dan Implikasi								
-Indeks tercapai tidak ada kendala.								
Tindakan yang Telah Dilaksanakan								
1. Mengirimkan nota dinas ke seluruh seksi untuk segera melaksanakan kegiatan yang berpotensi menyerap anggaran								
Rekomendasi Rencana Aksi					UIC		Periode	
melaksanakan kegiatan yang berpotensi menyerap anggaran dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan tersebut secara tepat waktu, sehingga pencairan dana dapat segera dilakukan					Subbag Umum		2026	
Akar Masalah								

Isu utama IKU ini adalah

1. Strategi pencapaian komponen IKA sementara disusun dengan mengacu pada ND-1058/KN.1/2025 tanggal 16 April 2025 hal Penyampaian Kebijakan IKU Indeks Kinerja Anggaran (IKA), capaian IKA untuk Triwulan I dan II, dan III mengacu pada capaian IKPA, sementara untuk Triwulan IV mengacu pada komposit capaian IKPA dan capaian SMART.
2. Adapun indikator IKPA yang belum optimal yaitu Penyerapan Anggaran dan Deviasi Halaman III DIPA. Sejalan dengan ketercapaian komponen Indeks kinerja anggaran, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung pencapaian dimaksud berupa *extra effort* yang telah dilakukan yaitu memberikan *early warning* pemenuhan target penyerapan, deviasi Halaman III DIPA, dan capaian output.

Target komponen Indeks kinerja anggaran berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Deviasi Halaman III Melaksanakan revisi pemutakhiran RPD dalam rangka menyelaraskan formulasi indikator RPD yang terbaru sesuai surat PER-5/PB/2024.
2. Melaksanakan proses revisi anggaran untuk mendukung pencapaian target IKU IKA.
3. Melaksanakan penginputan capaian *output* pada aplikasi SAKTI.

4. Melakukan *monitoring* DIPA dan Penyerapan Anggaran.

Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian yaitu terkait kurang optimalnya indikator penyerapan anggaran dan deviasi hal III DIPA. Adapun rencana aksi pencapaian target dimaksud pada tahun mendatang adalah memberikan *early warning* pemenuhan target penyerapan, deviasi Halaman III DIPA, dan capaian output.

2) IKU Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa

IKU ini mengukur komponen Kualitas Pengelolaan Pengadaan (diukur dari Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri) dan Indeks Tata Kelola Pengadaan yang meliputi SIRUP, *E-Tendering*, *E-Purchasing* Katalog, *Non E-Tendering* dan *Non E-Purchasing*, dan *E-Kontrak*.

Tujuan IKU Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa adalah untuk meningkatkan tata kelola pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pada tahun 2025 capaian terhadap IKU Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa terealisasi sebesar 112,50 dari Target 100,00 sehingga mencapai Nilai Indeks 112,50%.

Tabel 25
Capaian IKU Indeks Tata Kelola Pengadaan
Barang dan Jasa

KPKNL Jakarta V	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							
Sb-N								
Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa								
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	
Realisasi	100	125	125	112,5	112,5	112,5	112,5	
Capaian	100%	125%	125%	112,5	112,5	112,5	112,5	

Isu Utama dan Implikasi
Tidak ada kendala

3) IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

IKU ini mengukur persentase pegawai (bawahannya) yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangannya.

1. Pemenuhan Jam Pelatihan Pegawai

Bawahan telah memenuhi kriteria bila memenuhi minimal 25 JP, minimal 1 dari usulan rencana Pengembangan Kompetensi pada modul DKI telah dilaksanakan dan minimal 1 yang sesuai dengan tugas dan fungsi.

Standar jamlat adalah jumlah minimal jam pelatihan yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai dalam waktu satu tahun yaitu 25 jam pelatihan (JP). 1 jamlat adalah 45 menit. Standar jamlat minimal per tahun per pegawai adalah total 25 jamlat. Jenis Pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan pegawai mengacu pada Peraturan terkait Pengembangan kompetensi Pegawai Tercantum dalam PMK 216 Tahun 2018 tentang Manajemen Pengembangan SDM di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pemenuhan Pengembangan kompetensi pegawai dilakukan berdasarkan dengan Pengembangan Kompetensi yang telah direncanakan dan diusulkan pada usulan diklat pada Aplikasi Diklat.

Perencanaan Pengembangan Kompetensi pegawai berdasarkan usulan training dengan berdasar kesepakatan pegawai dengan atasannya. Pegawai yang dimaksud adalah pejabat eselon III/JF setara, eselon IV/JF setara, dan pelaksana/JF setara.

2. Pemenuhan Pemanggilan Pelatihan

AKP merupakan rangkaian proses analisis terhadap kesenjangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pegawai terhadap pencapaian target kinerja organisasi di lingkungan Kemenkeu, yang perlu dipenuhi dengan pembelajaran. Proses AKP di Kementerian Keuangan diatur dengan PMK-45/PMK.011/2018 tentang Pedoman Analisis Kebutuhan Pembelajaran di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Untuk itu, diperlukan komitmen seluruh pihak agar rencana pengembangan SDM melalui pembelajaran yang telah diidentifikasi dalam proses AKP dapat dipenuhi dengan optimal.

Tujuan IKU Presentase Pengembangan Kompetensi Pegawai adalah untuk mengukur upaya dalam mengembangkan SDM melalui alokasi waktu kerja yang digunakan untuk mengikuti pelatihan dan juga kesesuaian pelaksanaan dengan perencanaan pengembangan pegawai. IKU ini bermanfaat untuk mencermati pemenuhan kebutuhan pengembangan seluruh pegawai Kementerian Keuangan.

Pada tahun 2025 capaian terhadap IKU IKU Presentase Pengembangan Kompetensi Pegawai terealisasi sebesar 98,00% dari Target 80,00% sehingga mencapai Nilai Indeks 120,00%.

Tabel 26
Capaian IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

KPKNL Jakarta V	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							
	Indikator: Persentase pengembangan kompetensi pegawai							
T/R	Q1	Q2	SM I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%	
Realisasi	27%	59,02%	59,02%	73,70%	73,70%	98%	98%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Isu Utama dan Implikasi		Tindakan yang Telah Dilaksanakan	
Tidak ada kendala dalam pencapaian target Q4		Menghimbau dan melakukan koordinasi untuk mengikuti Pembelajaran seperti E-Learning dan lainnya	

Akar Masalah		Rekomendasi Rencana Aksi	UUC	Periode
		Melakukan monitoring pegawai yang belum memenuhi jamlatnya	Subbag umum	2026

7. Sasaran Strategis: Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif

1) IKU Indeks Penanganan Permasalahan Hukum

Indeks Penanganan Permasalahan Hukum untuk mengendalikan kerugian organisasi diukur melalui 2 (dua) komponen yaitu:

- a. Indeks Penanganan Permasalahan Hukum di Pengadilan (dengan bobot 80%), dan
- b. Indeks Putusan Perkara Berkekuatan Hukum Tetap (dengan bobot 20%)

Indeks Penanganan Permasalahan Hukum di Pengadilan

Bobot komponen: 80%

Target komponen: 85

Pengukuran ketepatan penanganan permasalahan hukum yang dihadapi terkait tugas dan fungsi DJKN, baik litigasi maupun non litigasi. Pengukuran dimulai pada saat Relas Gugatan/Panggilan Sidang diterima oleh DJKN, kemudian sesuai dengan tahapan penanganan hingga permasalahan hukum/perkara dimaksud dinyatakan selesai/berkekuatan hukum tetap.

Ruang lingkup/objek komponen:

- Perkara N saat belum terdapat putusan
- Perkara baru yang dihitung dalam pengukuran IKU hanya s.d. November 2025
- Perkara di lingkup Kanwil didapat dari penanganan perkara yang dilakukan Kanwil sendiri, maupun penanganan perkara yang dilakukan KPKNL di lingkungannya.

Indeks Putusan Perkara Berkekuatan Hukum Tetap

Bobot komponen: 20%

Target komponen: 90

Putusan adalah putusan atas:

- a) perkara perdata di Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- b) putusan perkara tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Agung;
- c) putusan atas uji materiil dan uji formil di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

Berkekuatan hukum tetap adalah putusan yang inkracht van gewijsde artinya terhadap keputusan itu tidak lagi terbuka suatu jalan hukum pada hakim lain atau hakim itu juga untuk mengubah keputusan itu.

Klasifikasi putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap didasarkan pada akibat hukum yang timbul dari ditetapkannya putusan perkara oleh Majelis Hakim.

Ruang lingkup/objek komponen:

- Perkara N saat sudah terdapat putusan
- Perkara di lingkup Kanwil didapat dari penanganan perkara yang dilakukan Kanwil sendiri, maupun penanganan perkara yang dilakukan KPKNL di lingkungnya

Tujuan IKU Indeks penanganan permasalahan hukum adalah agar terlaksananya penanganan permasalahan hukum yang optimal serta terselesaikannya permasalahan di bidang hukum yang dihadapi oleh unit organisasi beserta aparatur di dalamnya terkait pelaksanaan tugas dan fungsi.

Pada tahun 2025 capaian terhadap IKU Indeks Penanganan Permasalahan Hukum terealisasi sebesar 114,73% dari Target 100,00% sehingga mencapai Nilai Indeks 114,73%.

Tabel 27
Capaian IKU Indeks Penanganan Permasalahan Hukum

KPKNL Jakarta V	Penanganan hukum dan komunikasi public yang efektif							
	7a-CP Indeks Penanganan Permasalahan Hukum							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Poli/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	
Realisasi	107,25	100,09	100,09	115,52	115,52	114,73%	114,73%	
Capaian	107,25%	100,09	100,09	115,52	115,52	114,73%	114,73%	

Isu Utama dan Implikasi		Tindakan yang Telah Dilaksanakan	
-Tidak ada kendala		1. menghadiri sidang, menyusun dokumen2 persidangan atas gugatan	
Akar Masalah		Rekomendasi Rencana Aksi	UIC
		1. mengupdate perkembangan perkara tahun2 lama dalam aplikasi Sibankum yang belum terinformasikan dari pengadilan progress perkaraanya- meminta dokumen2 kelengkapan perkara untuk perkara yang ditangani Biro Advokasi Setjen	Seksi HI
			Periode
			2026

2) IKU Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)

Pengelolaan Informasi Publik pada seluruh unit Kementerian Keuangan berlandaskan pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PMK Nomor 110 Tahun 2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan. Adapun kewajiban yang dimiliki oleh pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) adalah penyampaian informasi publik, pelaporan pengelolaan layanan informasi publik, dan penunjukan petugas pengelola layanan informasi publik.

Dalam penyampaian informasi publik, pengelola layanan informasi publik pada Kanwil DJKN/KPKNL perlu melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan unit teknis pemilik data sesuai dengan permintaan informasi yang diajukan dari pemangku kepentingan. Adapun jangka waktu penyampaian informasi publik ditentukan sebagaimana amanat dari UU Nomor 14 Tahun 2008 dan PMK Nomor 110 Tahun 2022. Selain penyampaian informasi publik, pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) bertanggung jawab dalam menyampaikan laporan pengelolaan informasi publik yang disampaikan kepada pelaksana PPID di atasnya sesuai dengan norma waktu yang diatur dalam PMK Nomor 110 Tahun 2022 serta pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) wajib menyediakan, mengumumkan dan memutakhirkan Informasi Publik Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala, Informasi Publik yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta dan Informasi Publik Tersedia Setiap Saat secara berkala pada masing-masing website untuk menjaga agar Informasi Publik tetap akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

Tujuan IKU Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) adalah untuk terwujudnya pengelolaan layanan informasi publik yang tepat waktu.

Pada tahun 2025 capaian terhadap IKU Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) terealisasi sebesar 110,00 dari Target 80,00 sehingga mencapai Nilai Indeks 120,00%.

Tabel 28
Capaian IKU Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik

KPKNL Jakarta V	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif							
	75-H Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)							
T/R	Q1	Q2	SM.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	80	80	80	80	80	80	80	
Realisasi	116	116	116	110	110	110	110	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	
Isu Utama dan Implikasi								
Tidak ada kendala								
Tindakan yang Telah Dilaksanakan								
1. menyusun tanggapan atas permintaan informasi publik secara tepat waktu; mengupdate setiap permintaan informasi publik dalam link khusus PPID								
Akar Masalah								
Rekomendasi Rencana Aksi								
1. senantiasa melakukan koordinasi dengan PPID pusat terkait adanya permintaan informasi publik dan kemungkinan adanya keberatan dari pihak masyarakat terhadap tanggapan yang disampaikan oleh KPKNL JKT V								
UIC								
Seksi HI								
Periode								
2026								

8. Sasaran Strategis: Pengawasan dan Pengendalian Internal, serta Manajemen Resiko yang Efektif

1) IKU Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko

Dalam rangka mendukung implementasi reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan di lingkungan Kementerian Keuangan, telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang manajemen kinerja di lingkungan kementerian keuangan memberikan pengaturan dan pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kinerja baik pada unit organisasi maupun kepada setiap pegawai.

Di sisi lain, manajemen risiko memiliki peran strategis dalam mengenali potensi masalah atau dampak negatif yang dapat muncul dari ketidakpastian atau perubahan dalam lingkungan operasional, dan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mengurangi risiko atau mengatasi konsekuensinya terhadap sasaran organisasi sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 105/KMK.01/2022.

IKU Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko (IKMR) merupakan indikator yang mengukur kualitas implementasi atas manajemen kinerja dan risiko di

lingkungan DJKN meliputi seluruh tahapan eksekusi strategi, antara lain perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. IKU ini membagi indikator kualitas implementasi atas manajemen kinerja organisasi, manajemen kinerja pegawai, serta manajemen risiko yang diukur melalui kertas kerja IKMR.

Tujuan IKU Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko adalah untuk mengukur kualitas implementasi manajemen kinerja dan risiko di lingkungan DJKN serta untuk menghasilkan umpan balik yang positif bagi perbaikan kualitas di masa mendatang.

Pada tahun 2025 capaian terhadap IKU Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko terealisasi sebesar 97,61 dari Target 80,00 sehingga mencapai Nilai Indeks 120,00%.

Tabel 29
Capaian IKU Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko

KPKNL Jakarta V	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif							
	8a-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	80	80	80	80	80	80	80	
Realisasi	99,55	99	99	100	100	97,61	97,61	
Capaian	120%	120	120	120	120	120	120	

Isu Utama dan Implikasi	Tindakan yang Telah Dilaksanakan		
-Capaian Triwulan IV tidak terdapat kendala	-mendokumentasikan setiap pelaksanaan manajemen kinerja dan risiko dan menyampaikan tepat waktu		
Akar Masalah	Rekomendasi Rencana Aksi	UIC	Periode
	-Penyelesaian rencana kerja triwulan I 2026 tepat waktu	1. Sekai KI dan Subbag Umum	Triwulan I 2026

2) IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti

Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti adalah pengukuran tindak lanjut yang dilakukan atas tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Jenderal, berupa Rekomendasi *Policy Recommendation*, Rekomendasi Hukuman Disiplin, dan Rekomendasi Hasil Pengawasan selain *Policy Recommendation*.

Terdiri atas 4 komponen penilaian (sub IKU) dengan bobot yang telah ditentukan sbb:

1. Persentase Tindak Lanjut *Policy Recommendation* (Bobot 30%). => UIC Ir I s.d VI Pemilik Polrec

Rata-rata persentase *policy recommendation* yang ditindaklanjuti dengan penilaian polrec sebagaimana terlampir

2. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Itjen (data Teamcentral dan TeamMate+ minus Polrec) (Bobot 25%) => UIC Ir I s.d VII

Akumulasi Jumlah rekomendasi s.d. periode berjalan yang telah ditetapkan tuntas (*closed verified*) dan/atau TPTD dibandingkan jumlah rekomendasi yang harus diselesaikan sesuai jatuh tempo sebelum 31 Des Tahun Berjalan

3. Persentase Ketepatan Waktu Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Itjen (data *Teamcentral* dan *TeamMate+* minus Polrec) (Bobot 15%) => UIC Ir I s.d VII

Jumlah penyelesaian rekomendasi tepat waktu sebelum atau pas tanggal jatuh tempo dibandingkan jumlah rekomendasi yang harus diselesaikan sesuai jatuh tempo triwulan tersebut.

4. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hukdis oleh IBI (Bobot 30%) => UIC IBI

Sub Komponen I: Hasil Tindak Lanjut Rekomendasi Hukdis berdasarkan Laporan AI Itjen atau Tim PP94 (bobot 50%)

Sub Komponen II: Koordinasi, Bimbingan dan Konsultasi Permasalahan Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hukuman Disiplin (bobot 50%)

Tujuan IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti untuk mengukur kepatuhan organisasi dalam penyelesaian rekomendasi dari pengawas Internal

Pada tahun 2025 capaian terhadap IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan terealisasi sebesar 100,00% dari Target 95,30% sehingga mencapai Nilai Indeks 104,93%.

Tabel 30

**Capaian IKU Persentase Rekomendasi Hasil
Pengawasan yang Ditindaklanjuti**

KPKNL Jakarta V	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif							
	Bt-N Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-245	Pol/KP
Target	75,5%	82,5	82,5	89,75	89,75	100,00	100,00	
Realisasi	78,13%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Capaian	103,48%	120%	120%	111,42	111,42	104,93%	104,93%	

Isu Utama dan Implikasi	Tindakan yang Telah Dilaksanakan
Capaian Triwulan IV tidak terdapat kendala	1. Tindaklanjuti Pengurusan Piutang Negara yang Berasal dari TGR Kementerian Keuangan pada KPKNL Jakarta V sebagai berikut: 1. KPKNL telah melaksanakan koordinasi dan tindak lanjut atas pengurusan piutang tersebut melalui naskah dinas kepada Sekretaris Jenderal selaku Penyerah Piutang berupa nota dinas nomor ND-172/KNL.0705/2025 Hal Tindak Lanjut Pengurusan Piutang Negara yang Berasal dari TGR Kementerian Keuangan pada KPKNL Jakarta V pada tanggal 20 Februari 2025, dan 2. 2. KPKNL telah melaksanakan koordinasi dan tindak lanjut atas pengurusan piutang tersebut melalui naskah dinas kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak selaku koordinator kantor asal piutang negara berupa nota dinas nomor ND-173/KNL.0705/2025 Hal Tindak Lanjut Pengurusan Piutang Negara yang Berasal dari TGR Kementerian Keuangan pada KPKNL Jakarta V pada tanggal 20 Februari 2025.

Akar Masalah	Rekomendasi Rencana Aksi	UIC	Periode
	1. Monitoring dan Koordinasi dengan Auditor Inspektorat Jenderal secara rutin serta berkelanjutan	1. Seksi PN dan Seksi KI	2025

3) IKU Indeks Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM

Salah satu upaya strategis dalam pencegahan korupsi adalah dengan membangun Wilayah Bebas dari Korupsi yang berbasis integritas di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda).

Pencapaian WBK/WBBM merupakan tujuan utama dari pembangunan Zona Integritas pada K/L dengan menggunakan parameter dan instrumen sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Di internal Kementerian Keuangan sendiri, telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 395 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan, Penilaian, serta Pemantauan dan Evaluasi ZI-WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Predikat ZI menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, dengan rincian sebagai berikut:

1. Total nilai komponen pengungkit dan hasil, minimal 75,00 dengan nilai minimal 40,00.
2. Total nilai Indikator terwujudnya "Birokrasi yang bersih dan akuntabel" dengan nilai minimal 18,25 yang terdiri dari sub komponen "Survei persepsi anti korupsi" minimal 15,75 dan sub komponen "Kinerja lebih baik" minimal 2,50.
3. Indikator terwujudnya "Pelayanan publik yang prima" kepada masyarakat dengan nilai minimal 14,00.

Predikat ZI menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, serta peningkatan kualitas layanan publik, dengan rincian sebagai berikut

1. Total nilai komponen pengungkit dan hasil, minimal 85,00 dengan nilai minimal 48,00.
2. Total nilai Indikator terwujudnya "Birokrasi yang bersih dan akuntabel" dengan nilai minimal 19,50 yang terdiri dari sub komponen "Survei persepsi anti korupsi" minimal 15,75 dan sub komponen "Kinerja lebih baik" minimal 3,75.
3. Indikator terwujudnya "Pelayanan publik yang prima" kepada masyarakat dengan nilai minimal 15,75.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri PANRB 90 Tahun 2021 dan KMK 395 Tahun 2024, Tim Penilai diharapkan melalui pemantauan dan evaluasi terkait keberlanjutan pembangunan ZI-WBK dan ZI-WBBM bagi unit kerja yang telah berpredikat paling sedikit sekali dalam dua tahun.

Tujuan IKU Indeks Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM adalah untuk memastikan unit kerja tetap menjaga dan mempertahankan integritas melalui komitmen melanjutkan pembangunan Zona Integritas.

Pada tahun 2025 capaian terhadap IKU Indeks Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM terealisasi sebesar 120,00 dari Target 100,00 sehingga mencapai Nilai Indeks 120,00%.

Tabel 31

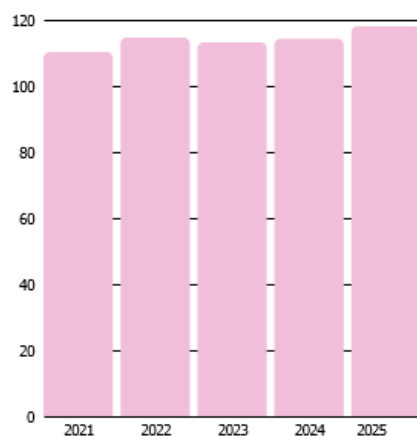
**Capaian IKU Indeks Capaian Unit Kerja dalam
Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM**

KPKNL Jakarta V	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif							
	Bc-N Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI WBK/WBBM							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-245	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	
Realisasi	85	120	120	120	120	120	120	
Capaian	85 %	120	120	120	120	120	120	
Isu Utama dan Implikasi								
Tidak terdapat kendala pada Q4.								
Akar Masalah								
1. Tidak terdapat masalah								
Tindakan yang Telah Dilaksanakan								
1. pemenuhan dokumen sesuai rekomendasi untuk capaian triwulan IV, Monitoring dan Evaluasi triwulanan terkait pelaksanaan program kerja Seluruh Sub Tim Keberlanjutan ZI WBBM								
Rekomendasi Rencana Aksi			UIC			Periode		
1. Pembinaan Kepala Kantor dan Monitoring dan Evaluasi rutin oleh ketua tim Keberlanjutan WBBM			1. Tim Keberlanjutan ZI WBBM KPKNL Jakarta V			2026		

II. Tren Kinerja KPKNL Jakarta V

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Jakarta V dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir tergambar sebagai berikut:

Tabel 32



2021	110.28%
2022	114.58%
2023	113.14%
2024	114.21%
2025	115.59%

B. REALISASI ANGGARAN

Guna pembiayaan satuan kerja di lingkungan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV dalam Tahun 2025 telah dialokasikan di Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025. Realisasi atas Anggaran dimaksud dapat dilihat pada beberapa tabel sebagai berikut:

Tabel 33

PAGU DAN REALISASI BELANJA

No	BA-Satker	Nama Satker	KPPN	Ket	Jenis Belanja									Total
					Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	Bansos	Lain-lain	Transfer	
1	015-119312	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA V	019	PAGU	0	3,597,814,000	176,080,000	0	0	0	0	0	0	3,773,894,000
				REALISASI		2,970,575,238	79,578,972							3,050,154,210
				PERSENTASE	0.00%	(82.57%)	(45.19%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	(80.82%)
				SISA	0	627,238,762	96,501,028	0	0	0	0	0	0	723,739,790
TOTAL				PAGU	0	3,597,814,000	176,080,000	0	0	0	0	0	3,773,894,000	
				REALISASI		2,970,575,238	79,578,972							3,050,154,210
				PERSENTASE	(0.00%)	(82.57%)	(45.19%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(80.82%)
				SISA	0	627,238,762	96,501,028	0	0	0	0	0	0	723,739,790
Disclaimer: Realisasi berbasis kas dan bersifat netto (memperhitungkan pengembalian belanja sebagai pengurang realisasi)														
sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Laporan Ketersediaan Dana (FA)														

DETAIL INDIKATOR HALAMAN 3 DIPA

No.	Kode Sakur	Nama Sakur	Kode KPPN	Periode	Rencana				Pengeluaran				Deviasi				% Deviasi				% Proporsi Page				% Deviasi Tertimbang				% Deviasi Seluruh J.Bel	% Rata-Rata Deviasi Kumulatif	Nilai BPA	
					51	52	53	57	51	52	53	57	51	52	53	57	51	52	53	57	51	52	53	57	51	52	53	57				
1	119312	KANTOR PELAYANAN KEKAYAHAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA V	019	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.59	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2	119312	KANTOR PELAYANAN KEKAYAHAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA V	019	02	0	158,999,998	0	0	0	158,726,658	0	0	0	273,340	0	0	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	97.59	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
3	119312	KANTOR PELAYANAN KEKAYAHAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA V	019	03	0	198,000,000	0	0	0	256,791,626	0	0	0	66,791,626	0	0	0.00	34.58	0.00	0.00	0.00	97.59	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
4	119312	KANTOR PELAYANAN KEKAYAHAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA V	019	04	0	158,000,000	0	0	0	146,851,900	0	0	0	3,348,100	0	0	0.00	2.23	0.00	0.00	0.00	97.59	2.41	0.00	0.00	2.18	0.00	0.00	2.18	0.55	100.00	
5	119312	KANTOR PELAYANAN KEKAYAHAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA V	019	05	0	160,000,000	0	0	0	162,131,031	0	0	0	2,131,031	0	0	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00	97.59	2.41	0.00	0.00	1.30	0.00	0.00	1.30	0.70	100.00	
6	119312	KANTOR PELAYANAN KEKAYAHAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA V	019	06	0	180,000,000	0	0	0	183,702,123	0	0	0	3,702,123	0	0	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00	97.59	2.41	0.00	0.00	2.01	0.00	0.00	2.01	0.92	100.00	

7	119312	KANTOR PELAYANAN KEKAYAHAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA V	019	07	0	214,999,999	0	0	0	215,632,720	0	0	0	632,721	0	0	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	97.64	2.36	0.00	0.00	0.28	0.00	0.00	0.28	0.82	100.00
8	119312	KANTOR PELAYANAN KEKAYAHAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA V	019	08	0	150,000,000	0	0	0	196,918,041	0	0	0	46,918,041	0	0	0.00	38.61	0.00	0.00	0.00	97.64	2.36	0.00	0.00	39.89	0.00	0.00	39.89	4.46	100.00
9	119312	KANTOR PELAYANAN KEKAYAHAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA V	019	09	0	224,999,998	0	0	0	242,670,041	0	0	0	17,670,043	0	0	0.00	7.58	0.00	0.00	0.00	97.64	2.36	0.00	0.00	7.41	0.00	0.00	7.41	4.79	100.00
10	119312	KANTOR PELAYANAN KEKAYAHAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA V	019	10	0	454,673,926	31,205,000	0	0	437,767,471	0	0	0	16,906,455	31,205,000	0	0.00	3.72	180.00	0.00	0.00	95.33	4.67	0.00	0.00	3.95	4.67	0.00	8.22	5.13	94.87
11	119312	KANTOR PELAYANAN KEKAYAHAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA V	019	11	0	367,717,523	56,836,000	0	0	251,098,671	68,338,000	0	0	116,816,852	12,504,000	0	0.00	31.71	22.00	0.00	0.00	95.33	4.67	0.00	0.00	38.23	1.03	0.00	31.26	7.50	92.50
12	119312	KANTOR PELAYANAN KEKAYAHAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA V	019	12	0	367,717,523	56,836,000	0	0	251,098,671	68,338,000	0	0	116,816,852	12,504,000	0	0.00	31.71	22.00	0.00	0.00	95.33	4.67	0.00	0.00	38.23	1.03	0.00	31.26	7.50	92.50

Tabel 34
CAPAIAN OUTPUT

No.	Uraian RO	Target	Realisasi RO	Persen Progress
1	Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	270	270	100
2	Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara	600	600	100
3	Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio Aset	680	680	100
4	Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara	20	20	100
5	Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara	1	1	100
6	Sosialisasi/Edukasi di Bidang Lelang	1	1	100
7	Risalah Lelang	500	500	100
8	Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara	1	1	100
9	Rekomendasi Hasil Penilaian	2	2	100
10	Penggalian Potensi Lelang	1	1	100
11	Aset BUN yang Dikelola	269	269	100
12	Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan (PN)	276	276	100
13	Kehumasan	5	5	100
14	Kerumahtanggaan	12	12	100
15	Layanan Bantuan Hukum	21	21	100
16	Layanan Perkantoran	12	12	100
17	Peralatan Fasilitas Perkantoran	4	4	100
18	Rekomendasi Kepatuhan Internal	5	5	100

C. KINERJA LAINNYA

1. Apresiasi dari Kanwil DJKN DKI Jakarta kepada KPKNL Jakarta V atas Layanan Penilaian Terbaik di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta

Dengan mempertimbangkan bahwa KPKNL Jakarta V telah memberikan layanan penilaian yang profesional bagi pengguna layanan dan memberikan dampak positif bagi organisasi, maka Kanwil DJKN DKI Jakarta memberikan apresiasi kepada KPKNL Jakarta V sebagai KPKNL dengan Kinerja Layanan Penilaian Terbaik I Tahun 2025.

Penghargaan tersebut diharapkan menjadi motivasi dalam pelaksanaan penilaian yang semakin baik pada tahun mendatang, serta memberikan semangat dan motivasi bagi segenap jajaran pegawai pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

2. Apresiasi dari Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Timur kepada KPKNL Jakarta V terkait Pelaksanaan Lelang Benda Sitaan Pajak

Kanwil DJP Jakarta Timur memberikan penghargaan atas kerjasama dalam Pelaksanaan Kegiatan Lelang Bersama Benda Sitaan Pajak yang dilaksanakan pada bulan Juni dan November 2025 bersama Kantor Pelayanan Pajak se-Jakarta Timur. Apresiasi ini menunjukkan komitmen KPKNL Jakarta V dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara melalui pelaksanaan lelang eksekusi pajak serentak. Dengan koordinasi yang solid bersama Kanwil DJP se-Jakarta Raya.

3. Pengarusutamaan Gender

Dalam rangka mewujudkan implementasi pengarusutamaan gender, KPKNL Jakarta V membentuk Tim Kerja Penguatan Implementasi Pengarusutamaan Gender Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V sebagaimana KEP- 27/KNL.0705/2025 Tahun 2025. Dalam hal ini Tim Implementasi Pengarusutamaan Gender KPKNL Jakarta V mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun konsep rencana dan kebijakan yang mendukung terwujudnya implementasi pengarusutamaan gender di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V;
- b. Menyusun Program Kerja pengarusutamaan gender;
- c. Menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pengarusutamaan gender;
- d. Menyelenggarakan kegiatan yang bermanfaat untuk mendukung kinerja pegawai terutama dalam hal yang terkait dengan pengarusutamaan gender;
- e. Mendokumentasikan segala bentuk kebijakan, program, rencana dan hal-hal lain terkait perwujudan pengarusutamaan gender;
- f. Melakukan evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan implementasi pengarusutamaan gender di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V.

BAB V

PENUTUP

Laporan Kinerja KPKNL Jakarta V tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025 dan disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja KPKNL Jakarta V tahun 2025 memuat capaian-capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen kontrak kinerja yang dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2025. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Selain itu Laporan ini juga memuat capaian lain yang berhasil diraih oleh KPKNL Jakarta V.

Berdasarkan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, pencapaian kinerja KPKNL Jakarta V berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Dari 8 (delapan) Sasaran Strategis yang dirinci menjadi 20 (dua puluh) IKU yang menjadi tanggung jawab KPKNL Jakarta V, dengan keseluruhannya memperoleh hasil maksimal dengan persentase capaian kinerja $\geq 100\%$ (indikator warna hijau) dan mencapai Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2025 sebesar 115,59%.

Ke depan, diharapkan kinerja KPKNL Jakarta V menjadi jauh lebih baik lagi dan target yang telah tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026 yang terdiri dari 8 (delapan) Sasaran Strategis dan 19 (Sembilan belas) IKU dapat terlampaui. Dengan demikian, Visi KPKNL Jakarta V untuk menjadi pengelola kekayaan negara, penilaian, dan lelang yang **akuntabel, produktif, dan inovatif** dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan, dapat terwujud secara paripurna.

LAMPIRAN



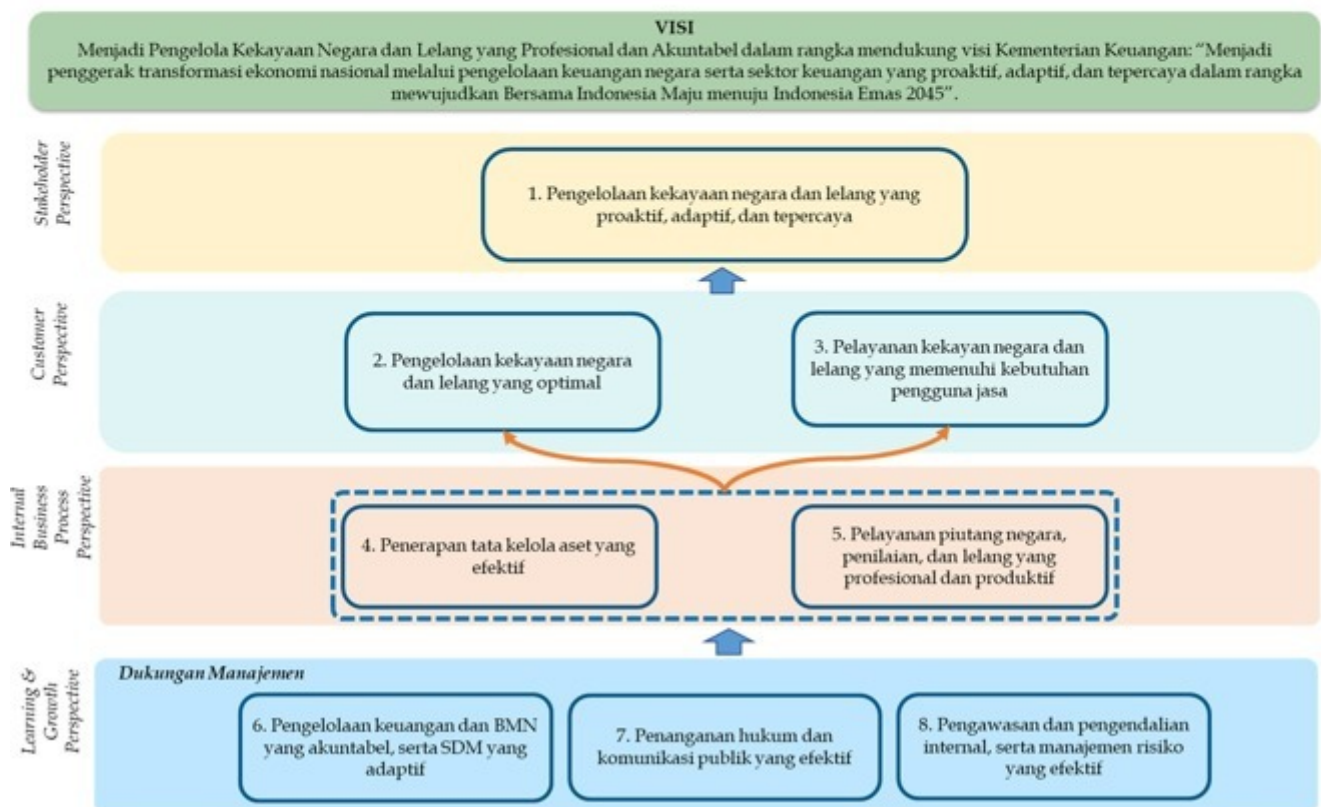
PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-5/WKN.07/2025
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
JAKARTA V
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peta Strategi



PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
JAKARTA V
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya	1a-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%
		1b-CP	Indeks integritas	100
		1c-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp111,14 M)
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp894 M)
		2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp1,68 T)
3	Pelayanan kekayan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%
		5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%
		5c-CP	Persentase produktivitas lelang	80%
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100
		6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100
		6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100
		7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80
		8b-N	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	95.3%
		8c-N	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-	100



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		WBK/WBBM	

Program/Kegiatan 2025

Anggaran

Program:

Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko Rp1,776,686,000

Kegiatan

1. Komunikasi, Edukasi dan Standardisasi Rp62,595,000

2. Pengelolaan Aset Rp1,714,091,000

Program:

Dukungan Manajemen Rp1,871,454,000

Kegiatan

1. Legislasi dan Litigasi Rp119,328,000

2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum Rp1,702,886,000

3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Rp12,688,000

4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal Rp36,552,000

Jakarta, 30 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara DKI Jakarta

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan
Lelang Jakarta V



Ditandatangani Secara Elektronik
Arif Bintarto Yuwono



Ditandatangani Secara Elektronik
Partolo



RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
JAKARTA V
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya							
1a-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	20%	50%	50%	70%	70%	100%	100%
1b-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
1c-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp111,14 M)
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp894 M)
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp1,68 T)
3	Pelayanan kekayan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa							
3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74	74	74	74
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif							
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							



Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif							
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif							
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	80	80	80	80	80	80
8b-N	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	75.5%	82.5%	82.5%	89.75%	89.75%	95.3%	95.3%
8c-N	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	100	100	100	100	100	100

Jakarta, 30 Januari 2025

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan
Lelang Jakarta V



Ditandatangani Secara Elektronik
Partolo



INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA V
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory			Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Waktu	Kegiatan	Output			

Jakarta, 30 Januari 2025

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta V



Ditandatangani Secara Elektronik
Partolo



**SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Partolo		NAMA	Arif Bintarto Yuwono
NIP	19680323 198803 1 004		NIP	19710912 199703 1 001
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I (IV/b)		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Madya (IV/d)
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta V		JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta V		UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%	Penerima Layanan
		Indeks integritas	100	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp111,14 M)	Penerima Layanan
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	Penerima Layanan
		Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp894 M)	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp1,68 T)	Penerima Layanan
3	Pelayanan kekayan negara dan lelang yang memenuhi	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	Penerima Layanan

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



	kebutuhan pengguna jasa			
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%	Proses Bisnis
		Persentase evaluasi kinerja BMN	100%	Proses Bisnis
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	Proses Bisnis
		Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	Proses Bisnis
		Persentase produktivitas lelang	80%	Proses Bisnis
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%	Penguatan Internal atau Anggaran
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	Penguatan Internal atau Anggaran
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	95.3%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				



PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
2	Akuntabel	
	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
3	Kompeten	
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.



PERILAKU KERJA		
5	Loyal	
	-Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah -Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara -Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif	
	-Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan -Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas -Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.
7	Kolaboratif	
	-Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi -Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah -Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.



Jakarta, 30 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Arif Bintarto Yuwono
19710912 199703 1 001

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Partolo
19680323 198803 1 004

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

DUKUNGAN SUMBER DAYA									
1.	43 pegawai								
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.								
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN									
	Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan								
	No	IKI	Target						
			Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
	1a-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	20%	50%	50%	70%	70%	100%	100%
	1b-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
	1c-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	(Rp111,14 M)
	2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
	2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	(Rp894 M)
	2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	(Rp1,68 T)

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74	74	74	74
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipkatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	80	80	80	80	80	80
8b-N	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	75.5%	82.5%	82.5%	89.75%	89.75%	95.3%	95.3%



	8c-N	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	100	100	100	100	100	100
KONSEKUENSI									
	<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>								
	<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>								

Jakarta, 30 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Arif Bintarto Yuwono

19710912 199703 1 001

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Partolo

19680323 198803 1 004

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025





**PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-5a/WKN.07/2025**

**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
JAKARTA V
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025**



PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
JAKARTA V
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp111,14 M)
		1b-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%
		1c-CP	Indeks integritas	100
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	2a-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp2,44T)
		2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp894 M)
		2c-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
3	Pelayanan kekayan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%
		5b-CP	Persentase produktivitas lelang	80%
		5c-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	6a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%
		6b-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100
		6c-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100
		7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	8a-N	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	95.3%
		8b-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80
		8c-N	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-	100



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		WBK/WBBM	

Program/Kegiatan 2025

Anggaran

Program:

Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko Rp1,776,686,000

Kegiatan

1. Komunikasi, Edukasi dan Standardisasi Rp62,595,000
2. Pengelolaan Aset Rp1,714,091,000

Program:

Dukungan Manajemen Rp1,871,454,000

Kegiatan

1. Legislasi dan Litigasi Rp119,328,000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum Rp1,702,886,000
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Rp12,688,000
4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal Rp36,552,000

Jakarta, 18 November 2025

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara DKI Jakarta

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan
Lelang Jakarta V



Ditandatangani Secara Elektronik
Dodok Dwi Handoko



Ditandatangani Secara Elektronik
Partolo



RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
JAKARTA V
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya							
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp111,14 M)
1b-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	20%	50%	50%	70%	70%	100%	100%
1c-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							
2a-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp2,44T)
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp894 M)
2c-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
3	Pelayanan kekayan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa							
3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74	74	74	74
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif							
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
5a-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
5b-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%
5c-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							



Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
6a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
6b-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100	100	100	100	100	100
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif							
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif							
8a-N	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	75.5%	82.5%	82.5%	89.75%	89.75%	95.3%	95.3%
8b-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	80	80	80	80	80	80
8c-N	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	100	100	100	100	100	100

Jakarta, 18 November 2025

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan
Lelang Jakarta V



Ditandatangani Secara Elektronik
Partolo



INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA V
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory			Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Waktu	Kegiatan	Output			

Jakarta, 18 November 2025

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta V



Ditandatangani Secara Elektronik
Partolo



SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Oktober s.d. 31 Desember Tahun 2025

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Partolo		NAMA	Dodok Dwi Handoko
NIP	19680323 198803 1 004		NIP	19750815 199503 1 001
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I (IV/b)		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda (IV/c)
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta V		JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta V		UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp111,14 M)	Penerima Layanan
		Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%	Penerima Layanan
		Indeks integritas	100	Penerima Layanan
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp2,44T)	Penerima Layanan
		Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp894 M)	Penerima Layanan
		Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	Penerima Layanan
3	Pelayanan kekayan negara dan lelang yang memenuhi	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	Penerima Layanan

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 18 November 2025



	kebutuhan pengguna jasa			
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%	Proses Bisnis
		Persentase evaluasi kinerja BMN	100%	Proses Bisnis
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	Proses Bisnis
		Persentase produktivitas lelang	80%	Proses Bisnis
		Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	Proses Bisnis
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks kualitas kinerja anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	Penguatan Internal atau Anggaran
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	Penguatan Internal atau Anggaran
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	95.3%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				



PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
2	Akuntabel	
	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
3	Kompeten	
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.



PERILAKU KERJA		
5	Loyal	
	-Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah -Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara -Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.
7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.



Jakarta, 18 November 2025

Pegawai yang Dinilai,

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Partolo

19680323 198803 1 004



Ditandatangani Secara Elektronik

Dodok Dwi Handoko

19750815 199503 1 001

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 18 November 2025



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Oktober s.d. 31 Desember Tahun 2025

DUKUNGAN SUMBER DAYA									
1.	40 pegawai								
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.								
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN									
	Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan								
	No	IKI	Target						
			Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp111,14 M)
	1b-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	20%	50%	50%	70%	70%	100%	100%
	1c-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
	2a-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp2,44T)
	2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp894 M)
	2c-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 18 November 2025



3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74	74	74	74
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
5a-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
5b-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%
5c-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
6b-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100	100	100	100	100	100
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
8a-N	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	75.5%	82.5%	82.5%	89.75%	89.75%	95.3%	95.3%
8b-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	80	80	80	80	80	80



	8c-N	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	100	100	100	100	100	100
KONSEKUENSI									
	<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>								
	<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>								

Jakarta, 18 November 2025

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Partolo

19680323 198803 1 004

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Dodok Dwi Handoko

19750815 199503 1 001

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 18 November 2025





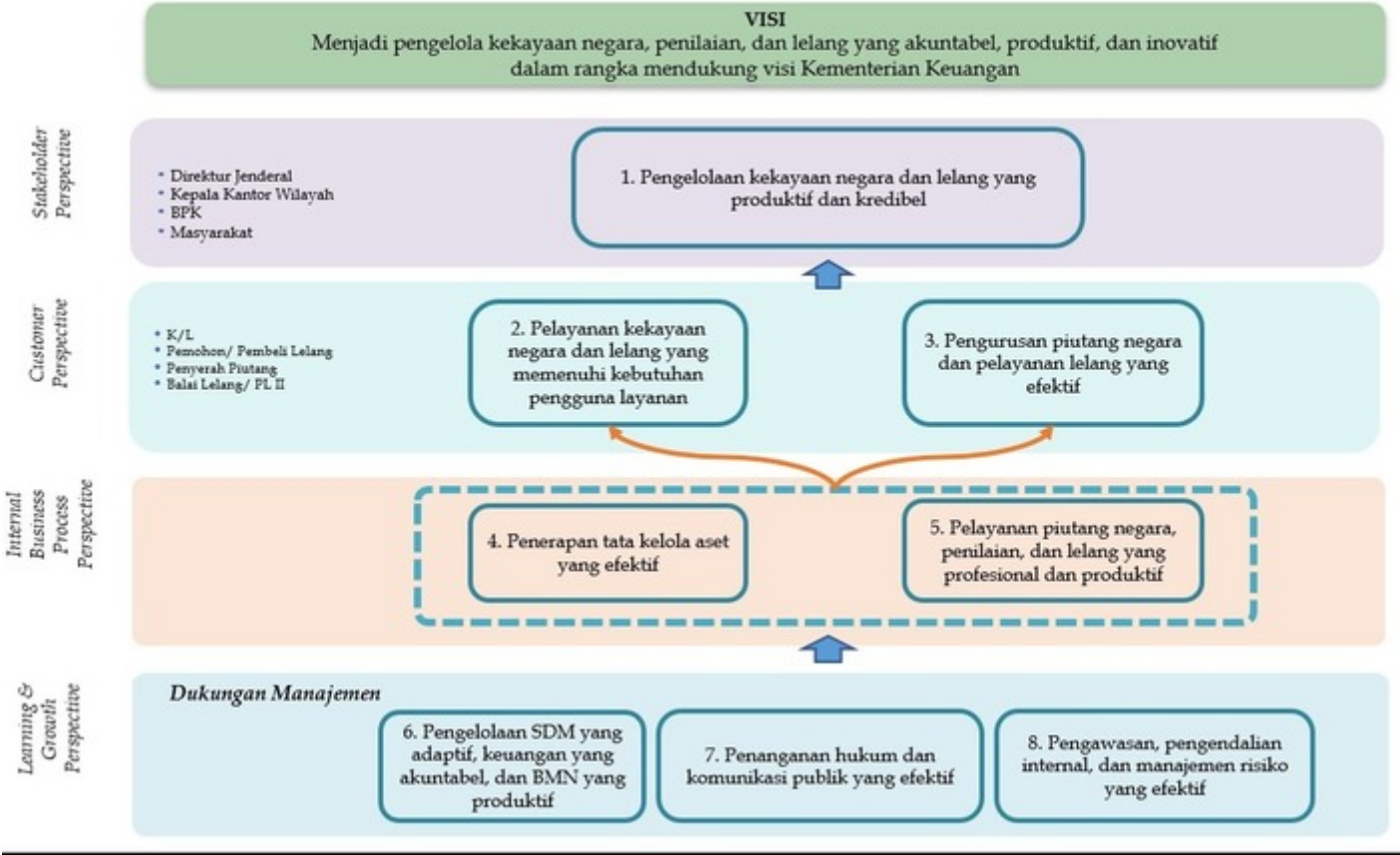
**PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-5/WKN.07/2026
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
JAKARTA V
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2026**

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.





PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
JAKARTA V
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang produktif dan kredibel	1a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan	100
		1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp111,24 M)
2	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna layanan	2a-CP	Persentase Akurasi Data IGT Peta BMN Berupa Tanah	100%
		2b-N	Tingkat efektivitas pembinaan	80%
3	Pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang efektif	3a-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp1T)
		3b-CP	Persentase realisasi kinerja lelang	100% (Rp745M)
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		4b-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		4c-N	Persentase Evaluasi Kinerja BMN	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%
		5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	80%
		5c-CP	Persentase produktivitas lelang	85%
6	Pengelolaan SDM yang adaptif, keuangan yang akuntabel, dan BMN yang produktif	6a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
		6b-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	100
		6c-N	Indeks pengelolaan kearsipan	80
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-CP	Indeks efektivitas komunikasi publik	80
		7b-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	80
8	Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif	8a-N	Indeks integritas organisasi	100
		8b-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	83

Program/Kegiatan 2026

Program:

Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko

Kegiatan

Anggaran

Rp2,661,590,000



1.	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp87,010,000
2.	Pengelolaan Aset	Rp2,574,580,000
Program:		
	Program Dukungan Manajemen	Rp2,060,653,000
Kegiatan		
1.	Legislasi dan Litigasi	Rp119,328,000
2.	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp1,862,845,000
3.	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Rp25,376,000
4.	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp53,104,000

Jakarta, Januari 2026

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara DKI Jakarta



Ditandatangani Secara Elektronik
Dodok Dwi Handoko

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan
Lelang Jakarta V



Ditandatangani Secara Elektronik
Partolo



RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
JAKARTA V
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2026

Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang produktif dan kredibel							
1a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp111,24 M)
2	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna layanan							
2a-CP	Persentase Akurasi Data IGT Peta BMN Berupa Tanah	5%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
2b-N	Tingkat efektivitas pembinaan	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
3	Pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang efektif							
3a-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp1T)
3b-CP	Persentase realisasi kinerja lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp745M)
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif							
4a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
4b-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4c-N	Persentase Evaluasi Kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
5c-CP	Persentase produktivitas	30%	40%	40%	75%	75%	85%	85%



Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
	lelang							
6	Pengelolaan SDM yang adaptif, keuangan yang akuntabel, dan BMN yang produktif							
6a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6b-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Indeks pengelolaan kearsipan	10	25	25	50	50	80	80
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif							
7a-CP	Indeks efektivitas komunikasi publik	80	80	80	80	80	80	80
7b-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	80	80	80	80	80	80	80
8	Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif							
8a-N	Indeks integritas organisasi	100	100	100	100	100	100	100
8b-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	83	83	83	83	83	83	83

Jakarta, Januari 2026

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan
Lelang Jakarta V



Ditandatangani Secara Elektronik
Partolo



INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA V
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2026

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory			Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Waktu	Kegiatan	Output			

Jakarta, Januari 2026

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta V



Ditandatangani Secara Elektronik
Partolo



SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2026

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Partolo		NAMA	Dodok Dwi Handoko
NIP	19680323 198803 1 004		NIP	19750815 199503 1 001
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I (IV/b)		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda (IV/c)
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta V		JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta V		UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang produktif dan kredibel	Indeks kepuasan pengguna layanan	100	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp111,24 M)	Penerima Layanan
2	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna layanan	Persentase Akurasi Data IGT Peta BMN Berupa Tanah	100%	Penerima Layanan
		Tingkat efektivitas pembinaan	80%	Penerima Layanan
3	Pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang efektif	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp1T)	Penerima Layanan
		Persentase realisasi kinerja lelang	100% (Rp745M)	Penerima Layanan
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	Proses Bisnis

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026



		Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%	Proses Bisnis
		Persentase Evaluasi Kinerja BMN	100%	Proses Bisnis
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	Proses Bisnis
		Tingkat kualitas layanan penilaian	80%	Proses Bisnis
		Persentase produktivitas lelang	85%	Proses Bisnis
6	Pengelolaan SDM yang adaptif, keuangan yang akuntabel, dan BMN yang produktif	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks kualitas kinerja anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks pengelolaan kearsipan	80	Penguatan Internal atau Anggaran
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	Indeks efektivitas komunikasi publik	80	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks penanganan permasalahan hukum	80	Penguatan Internal atau Anggaran
8	Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif	Indeks integritas organisasi	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	83	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				



PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
2	Akuntabel	
	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
3	Kompeten	
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	



PERILAKU KERJA		
	-Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah -Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara -Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif	
	-Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan -Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas -Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.
7	Kolaboratif	
	-Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi -Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah -Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.



Jakarta, Januari 2026

Pegawai yang Dinilai,

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Partolo

19680323 198803 1 004



Ditandatangani Secara Elektronik

Dodok Dwi Handoko

19750815 199503 1 001

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2026

DUKUNGAN SUMBER DAYA									
1.	44 pegawai								
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.								
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN									
	Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan								
	No	IKI	Target						
			Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
	1a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan	100	100	100	100	100	100	100
	1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp111,24 M)
	2a-CP	Persentase Akurasi Data IGT Peta BMN Berupa Tanah	5%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
	2b-N	Tingkat efektivitas pembinaan	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
	3a-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp1T)
	3b-CP	Persentase realisasi kinerja lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp745M)

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026



4a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
4b-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4c-N	Persentase Evaluasi Kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	75%	75%	85%	85%
6a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6b-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Indeks pengelolaan kearsipan	10	25	25	50	50	80	80
7a-CP	Indeks efektivitas komunikasi publik	80	80	80	80	80	80	80
7b-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	80	80	80	80	80	80	80
8a-N	Indeks integritas organisasi	100	100	100	100	100	100	100
8b-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	83	83	83	83	83	83	83
KONSEKUENSI								
	Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.							
	Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.							



Jakarta, Januari 2026

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Partolo

19680323 198803 1 004

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Dodok Dwi Handoko

19750815 199503 1 001

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026





KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN DKI JAKARTA

SERTIFIKAT PENGHARGAAN

DENGAN BANGGA DIBERIKAN KEPADA

KPKNL Jakarta V

sebagai

KPKNL dengan Kinerja Layanan Penilaian Terbaik I

Tahun 2025

Jakarta, 27 Januari 2026

Ditandatangani secara elektronik
Dodok Dwi Handoko
Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta

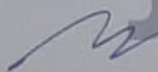
SERTIFIKAT

APRESIASI

Diberikan kepada:

KPKNL Jakarta V

Atas kerjasama dalam pelaksanaan Kegiatan Lelang
Bersama Benda Sitaan Pajak Kantor Wilayah DJP
Jakarta Timur Tahun 2025



Ahmad Djamhari

Kepala Kantor Wilayah DJP
Jakarta Timur



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG JAKARTA V

NOMOR KEP-27/KNL.0705/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PENGUATAN IMPLEMENTASI
PENGARUSUTAMAAN GENDER PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN
NEGARA DAN LELANG JAKARTA V

KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA
V,

Menimbang : a. bahwa implementasi pengarusutamaan gender di lingkungan Kementerian Keuangan merupakan kegiatan yang terintegrasi dengan program strategis yang telah direncanakan;

b. bahwa sebagai salah satu instansi vertikal yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V perlu mengimplementasikan Pengarusutamaan Gender (PUG);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V tentang Pembentukan Tim Kerja Penguatan Implementasi Pengarusutamaan Gender pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

2. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 807/KMK.01/2018 tentang Pedoman Implementasi Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Kementerian Keuangan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA V TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PENGUATAN IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA V

- KESATU : Membentuk Tim Kerja Penguatan Implementasi Pengarusutamaan Gender Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V dengan susunan keanggotaan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V ini.
- KEDUA : Tim Kerja Penguatan Implementasi Pengarusutamaan Gender Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Menyusun konsep rencana dan kebijakan yang mendukung terwujudnya implementasi pengarusutamaan gender di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V;
 2. Menyusun Program Kerja pengarusutamaan gender;
 3. Menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pengarusutamaan gender;
 4. Menyelenggarakan kegiatan yang bermanfaat untuk mendukung kinerja pegawai terutama dalam hal yang terkait dengan pengarusutamaan gender;
 5. Mendokumentasikan segala bentuk kebijakan, program, rencana dan hal-hal lain terkait perwujudan pengarusutamaan gender;
 6. Melakukan evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan implementasi pengarusutamaan gender di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:
1. Penanggung Jawab
 2. Ketua
 3. Wakil Ketua
 4. Sekretaris
 5. Kelompok Kerja Bidang Perencanaan dan Kebijakan;
 6. Kelompok Kerja Bidang Sarana dan Prasarana;
 7. Kelompok Kerja Bidang Kreativitas dan Inovasi;
 8. Kelompok Kerja Bidang Kegiatan dan Dokumentasi;
 9. Kelompok Kerja Bidang Monitoring dan Evaluasi.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta V ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta V ini disampaikan kepada:

1. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V;
2. Kepala Subbagian Umum dan para Kepala Seksi pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Februari 2025

KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN
NEGARA DAN LELANG JAKARTA V,



Ditandatangani secara elektronik
PARTOLO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN
KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA V
NOMOR: [KEP-27/KNL.0705/2025](#)
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PENGUATAN
IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER
PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA
DAN LELANG JAKARTA V

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA PENGUATAN IMPLEMENTASI
PENGARUSUTAMAAN GENDER PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN
NEGARA DAN LELANG JAKARTA V

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Partolo NIP 196803231988031004	Kepala Kantor	Penanggung Jawab
2.	Artho Guntoro NIP 197411241999031002	Kepala Subbagian Umum	Ketua
3.	Rizal Alpiani NIP 197210091999031002	Kepala Seksi Hukum dan Informasi	Wakil Ketua
4.	Sayidi NIP 196811201989031001	Kepala Seksi Kepatuhan Internal	Sekretaris I
5.	A. Hidran Hakim NIP 197608052000121001	Pelelang Ahli Muda	Sekretaris II
KELOMPOK KERJA BIDANG PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN			
1.	Hari Santosa NIP 197601091996031001	Kepala Seksi Piutang Negara	Koordinator
2.	Arief Ar Rosyid NIP 198510312009011003	Pelelang Ahli Pertama	Anggota
3.	Ilman Kurniawan Syaray NIP 198506032007101001	Pelelang Ahli Pertama	Anggota
4.	Wulandari NIP 197705251999032001	Pelaksana	Anggota
5.	Fahrino Ahmad NIP 198401302006021006	Pelaksana	Anggota
6.	David Sihombing NIP 199204052014111005	Pelaksana	Anggota
7.	Nur Ayu Saraswati NIP 199212012014112002	Pelaksana	Anggota
8.	Novi Kurniasih NIP 199511242016122001	Pelaksana	Anggota
KELOMPOK KERJA BIDANG SARANA DAN PRASARANA			
1.	Maharsa Udayana NIP 197311151999031001	Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara	Koordinator
2.	Thomas Dedy Mahotama NIP 199309012018011003	Penilai Pemerintah Ahli Pertama	Anggota
3.	Ety Widayati NIP 196705251990112001	Pelaksana	Anggota
4.	Aenul Yakin NIP 198612052008121002	Pelaksana	Anggota
5.	Yunita Sari NIP 99506262018012002	Pelaksana	Anggota
6.	Muhammad Ary Hendrawan NIP 199709072018121001	Pelaksana	Anggota
7.	Nur'aini Husaeni NIP 199702202019022002	Pelaksana	Anggota
KELOMPOK KERJA BIDANG KEGIATAN DAN DOKUMENTASI			
1.	Susanto Eko Prasetya NIP 197911012001121003	Penilai Pemerintah Ahli Muda	Koordinator
2.	Ranisa Astria NIP 199302222018012003	Pelelang Ahli Pertama	Anggota
3.	Popi Damayanti NIP 197306021999032002	Pelaksana	Anggota
4.	Teddy Indramawan NIP 197711141999031001	Pelaksana	Anggota

5.	Brilly Arta Farasadi NIP 198811282013101001	Pelaksana	Anggota
6.	Havivi Natapura NIP 199410282016121001	Pelaksana	Anggota
7.	Muhammad Faniawan Asriansyah NIP 199506082018011004	Pelaksana	Anggota
8.	Ihfadhimah NIP 199605092018012003	Pelaksana	Anggota
KELOMPOK KERJA BIDANG KREATIVITAS DAN INOVASI			
1.	Husnaeni NIP 197501151999032002	Penilai Pemerintah Ahli Muda	Koordinator
2.	Muhammad Zein Hazimy NIP 198402112010121003	Pelelang Ahli Muda	Anggota
3.	Yurista Vipriyanti NIP 199201152018012002	Penilai Pemerintah Ahli Pertama	Anggota
4.	Alif Arsyad Masykuri NIP 198707302008121002	Pelaksana	Anggota
5.	Sari Maysarah NIP 199201092019022007	Pelaksana	Anggota
6.	Wahyu Meyfi Rahmanita NIP 198805292007102001	Pelaksana	Anggota
7.	Riandika Haryo Putro NIP 199203312014111001	Pelaksana	Anggota
8.	Abdi Dharma Putra NIP 99512062016121001	Pelaksana	Anggota
KELOMPOK KERJA BIDANG MONITORING DAN EVALUASI			
1.	Erwin Cahyono NIP 197510241999031002	Pelelang Ahli Madya	Koordinator
2.	Budi Satrio NIP 198008052003121001	Pelelang Ahli Muda	Anggota
3.	Ahmad Chasan Mudzakir NIP 199401152018011005	Penilai Pemerintah Ahli Pertama	Anggota
4.	Tri Wahyuningsih NIP 199102022012102001	Pranata Keuangan APBN Mahir	Anggota
5.	Aprillia Handayani NIP 198304012004122001	Pelaksana	Anggota
6.	Andika Ramadani Ababil 199502272016121002	Pelaksana	Anggota
7.	Hanna Afina Azmi NIP 199707142018122001	Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Februari 2025
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN
NEGARA DAN LELANG JAKARTA V,



Ditandatangani secara elektronik
PARTOLO

